

**PENGARUH ISU TERORISME INTERNASIONAL
TERHADAP PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR
NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA
DALAM BIDANG PERTAHANAN DAN EKONOMI**

SKRIPSI



Milik UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional
Pada
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Asli telah
Pembelian
Terima

Tgl. 17 JAN 2004

Klas
327750598
WIC
P. E.

Oleh :

AMERIKA SERIKAT - HUBUNGAN LUAR NEGERI
- NOODERIT

K. Agung Wicaksono

NIM. 980910101126

Dosen Pembimbing :

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2003**

LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S-1), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 1 November 2003
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

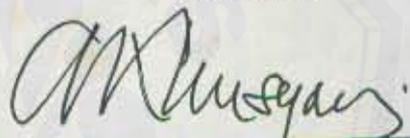
Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris



Drs. Asrial Aziz



Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA

Susunan Panitia Penguji,

Drs. Asrial Aziz
NIP 130 355 413

(Ketua)

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA
NIP 130 261789

(Sekretaris)

Drs. Umaidi Radi, MA
NIP 130 239 058

(Anggota)

Drs. Agus Tri H
NIP 132 133 401

(Anggota)

Mengetahui
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan



Drs. H. Moch. Toerki
NIP 130 524 832

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

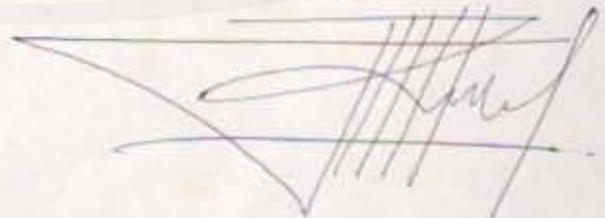
Nama : K. Agung Wicaksono
NIM : 980910101126
Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Institusi : Universitas Jember

Sebagai penulis menyatakan bahwa : " Skripsi ini adalah karya saya sendiri" Dan bahan – bahan yang dipergunakan dalam penulisan ini berasal dari sumber – sumber yang sah dan diketahui.

Demikian pernyataan saya tersebut dibuat dengan sebenar – benarnya.

Jember, 2003

Penulis,



K. Agung Wicaksono

NIM. 980910101126

PERSEMBAHAN

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ibunda Dieni Nurjati dan Ayahanda Suprihno, terima kasih atas kasih sayang, do'a dan harapan yang selalu kalian berikan, semoga Allah SWT menyayangi kalian sebagaimana engkau menyayangiku, dan semoga aku mampu mewujudkan keinginan dan cita – cita serta memberikan yang terbaik untuk kalian.

Kakakku Tersayang,

Dian Rosita Prihana, terimakasih atas nasehat, tawa dan canda yang selalu mengiringi hari hariku, semoga kamu bahagia bersama belahan jiwamu, Moch. Rofi'uddin dan menjadi keluarga yang sakinah.

MOTTO :

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang - orang yang khusu'

(QS. Al Baqarah : 65)

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh - sungguh (urusan yang lain dan hanyalah kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap

(QS. Al Insiroh 6-8)

*Cintaku kepadamu adalah khusus, wahai Kekasih Tunggal.
Dan aku peduli bukan karena janji akan surga.
Ia membuatku melupakan dua dunia.
Mengenal - Mu merupakan sesuatu yang teramat sangat indah*

(Hazrat Mumshad Denori)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Hanya puji syukur yang patut penulis ucapkan, karena hanya berkat rahmat dan hidayah-Nya penulisan skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Hal yang sangat membantu penyelesaian karya tulis ini adalah adanya motifasi dan bantuan dari berbagai pihak yang penulis rasakan sangat besar maknanya. Untuk itu dengan penuh rasa hormat dan rasa tulus ikhlas penulis ucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. *Bapak Prof. Dr. Akhmad Khusyairi, MA*, selaku Dosen Pembimbing yang disela – sela kesibukan beliau masih bersedia memberikan waktu untuk memberikan pengarahannya dan bimbingan serta nasehat demi kesempurnaan skripsi ini.
2. *Bapak Drs. Himawan Bayu P. MA*, selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama penulis menempuh pendidikan di FISIP – UNEJ
3. *Bapak Drs. H. Moch. Toerki*, selaku Dekan beserta segenap civitas akademika FISIP – Unej.
4. *Drs. Nurrudin M. Yasin*, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember
5. *Dra. Sri Yuniati, Msi*, selaku Sekertaris Jurusan Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Jember.

6. Kedua orang tuaku, *Ibunda tercinta Dieni Nurjati dan Ayahanda Suprihno serta Mbak Dian Rosita Prihana* yang telah mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis
7. *Keluarga besar Mangundiwirjo* dimanapun berada, yang telah memberikan banyak bantuan, nasehat dan saran yang dapat digunakan penulis sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan.
8. *Keluarga DR. Ir. Didik Sulistyanto, mbak Christ dan Dik Arno serta sikecil Aulia*, terima kasih atas semua perhatian, nasehat serta semua bantuan yang diberikan kepada penulis selama menuntut ilmu.
9. Arek – Arek Jaguar Camp Sentot Prawirodirjo 37, *Wahyudi "nanov" Yulistira, Ahmat "Cobain" Saiful, Abdul "Ishom" Rahman, Tito Kusuma "Totti" Wardhana.*
10. Arek – Arek Jawa VI/15 : *Must Bambang, Lik Yus, Must Izur, Must Syuga, Must Henry, Ghopar, Dayat, Eca, Edwin, Heru, Tri W, Sitorus, Irwan, Rizki.*
11. Teman – teman seperjuangan *EX - @27, Smaza : Jendoel, Jembix, Pendex, She- diep, Moon Young, She- noxs, Utix, Naninnx, Iyuth*
12. *Keluarga besar HI 98 Fisip Unej, Iwan, Yoni, Nurbi, Andi Sarjono, Ani Purwati, Irma Wisnu, Multazam, Mahendra, Unin dan semua teman – teman yang belum tercantum.*
13. Arek – Arek Salaffiyah *Mastrip Rio, Shidik, Nawir, dkk*

14. Special thank's to *R.Ekayanni and Arista* atas *supportnya* dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan akhirnya terima kasih kepada semua pihak yang telah mengukir berbagai cerita dan peristiwa indah dalam kehidupan penulis.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih belum sempurna, sebagaimana kata pepatah, “ tiada gading yang tak retak “. Oleh karena itu penulis selalu mengharapkan kritik dan saran, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi almamater dan semua pihak yang tertarik membacanya.

Oktober 20003

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	8
1.2.1 Batasan Materi.....	9
1.2.2 Batasan Waktu.....	9
1.3 Problematika.....	11
1.4 Kerangka Dasar Teori.....	13
1.5 Hipotesa.....	20
1.6 Metode Penelitian.....	21
1.6.1 Tahap Pengumpulan Data.....	22
1.6.2 Tahap Analisa Data.....	22
1.7 Pendekatan.....	23

BAB II POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN TERORISME INTERNASIONAL

2.1 Prinsip Dasar Politik Luar Negeri Amerika Serikat.....	26
2.2 Perkembangan Global Politik Luar Negeri Amerika Serikat.....	32
2.3.1 Definisi Terorisme Internasional dalam Perspektif Amerika Serikat.....	41
2.3.2 Peristiwa – peristiwa Terorisme yang terjadi di Amerika Serikat.....	43
2.3.3 Usaha Amerika dalam Memerangi Terorisme Internasional.....	54
2.4 Hubungan Indonesia dan Amerika Serikat sebelum 11 September 2001.....	58

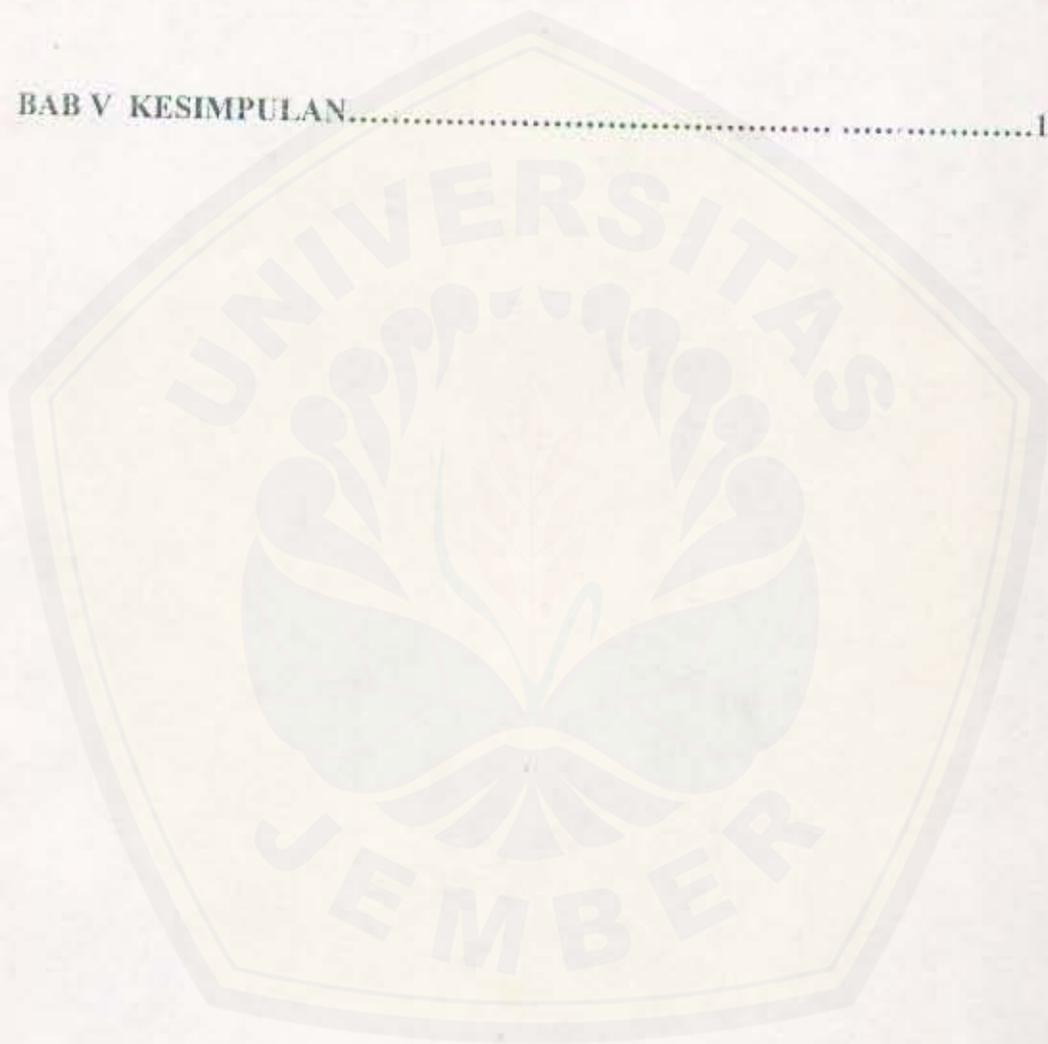
**BAB III FAKTOR – FAKTOR YANG BERPERAN DALAM
MEMPENGARUHI PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK LUAR
NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP INDONESIA**

3.2 Peran Departemen Pertahanan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri.....	73
3.3 Peran Departemen Luar Negeri dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri.....	79
3.4 Peran Departemen Perdagangan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri.....	83
3.5 Peran Kongres dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri	88
3.6 Peran Kelompok Kepentingan dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri.....	94
3.6.1 Multinational Corporation.....	96
3.6.2 Military Industrial Complex.....	100
3.6.3 Peran Media Massa dalam Proses Pembuatan Kebijakan Politik Luar Negeri.....	109

**BABIV IMPLEMENTASI PERUBAHAN KEBIJAKAN POLITIK
LUARNEGERI AMERIKA SERIKAT DAN DAMPAKNYA
TERHADAP INDONESIA**

4.1 Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	112
4.2 Bidang Ekonomi.....	118

4.3	Dampak perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bidang Pertahanan dan Keamanan.....	120
4.4	Dampak perubahan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat di Bidang Ekonomi.....	122
BAB V KESIMPULAN.....		124



LEMBAR PENGESAHAN

Diterima dan Dipertahankan di Depan Panitia Penguji Skripsi Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata I (S-1), Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember

Pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 1 November 2003
Jam : 09.00 WIB
Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Panitia Penguji,

Ketua

Sekretaris

Drs. Asrial Aziz

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi. MA

Susunan Panitia Penguji,

Drs. Asrial Aziz (Ketua)
NIP 130 355 413

Prof. Dr. Akhmad Khusyairi. MA (Sekretaris)
NIP 130 261789

Drs Umaidi Radi. MA (Anggota)
NIP 130 239 058

Drs. Agus Tri H (Anggota)
NIP 132 133 401

Mengetahui,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember
Dekan,

Drs. H. Moch. Toerki
NIP 130 524 832



PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Isu terorisme internasional sebenarnya merupakan salah satu isu yang telah lama menjadi agenda persoalan yang dihadapi oleh dunia internasional. Terorisme merupakan suatu bentuk kekerasan yang digolongkan ke dalam kekerasan politik, atau bisa juga disebut sebagai kekerasan sipil. Kekerasan politik dapat menyangkut jangkauan yang sangat luas, mulai dari protes yang menggunakan kekerasan, pemberontakan sporadis dan spontan, pemberontakan yang berencana dan berlanjut, kudeta, sampai ke revolusi. Perang antar negara tidak termasuk didalamnya yang merupakan kekerasan militer, tetapi perang saudara (civil war) termasuk. Dalam pengertian kekerasan politik yang berbentuk terorisme, termasuk juga didalamnya penggunaan atau ancaman penggunaan kekerasan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri atau sebagian dari rakyatnya sendiri. Yang dimaksud kekerasan dalam hal ini adalah penggunaan kekerasan fisik yang direncanakan, dipersiapkan dan dilancarkan secara mendadak terhadap sasaran langsung yang lazimnya adalah nonkombatan untuk mencapai tujuan politik. (Hasnan Habib, 1997:571).

Isu terorisme kini tidak hanya merupakan masalah domestik saja, akan tetapi telah memiliki *spektrum* yang lebih luas, yaitu menyangkut masalah keamanan dan stabilitas politik internasional. Hal ini dikarenakan perbedaan antara terorisme internasional dan terorisme domestik sudah makin kabur. Dahulu

perbedaan itu dapat dilihat dengan jelas, apakah suatu organisasi teroris semata – mata hanya dalam batas wilayah suatu negara atau telah melampaui batas – batas internasional. Sekarang banyak organisasi terorisme memperluas wilayah operasinya melampaui batas wilayah suatu negara. Organisasi terorisme sekarang, juga memiliki jaringan yang rapi dan beranggotakan orang – orang yang berasal dari berbagai negara. Mereka juga memiliki kepentingan – kepentingan yang bersifat politis yang berdampak luas tidak saja secara regional tapi juga bisa berdampak pada stabilitas internasional. Tujuan politis itu umumnya ditransformasikan ke tingkat moralita yang lebih tinggi, dengan maksud memperoleh pembenaran (*justification*). Organisasi teroris modern tidak hanya mengumumkan tujuan politiknya tetapi juga sekaligus mengaitkannya dengan suatu “kebenaran universal”.

Masalah terorisme internasional menjadi sebuah masalah yang sulit diatasi oleh dunia internasional, diakibatkan oleh banyaknya kendala dalam proses penyelesaiannya. Kendala utama yang dihadapi adalah belum adanya suatu konsensus kongkrit untuk memerangi tindakan terorisme internasional, yang disebabkan oleh adanya perbedaan pandangan tentang persepsi nasional, dalam hal ini menyangkut “*nasional interest*” diantara masing – masing negara. Negara – negara tidak ingin mendasarkan sikap dan responnya terhadap suatu kekerasan politik (terorisme) hanya pada rumusan definisi saja. Hal ini karena respon yang dilakukan mungkin sekali justru akan menimbulkan konflik dengan kepentingan politik luar negeri maupun dalam negeri yang lebih besar.

Sasaran langsung dari kelompok terorisme internasional adalah menciptakan teror (suasana kengerian). Rasa ketakutan yang mencekam dan kegelisahan politik yang ditimbulkan dari aksinya tersebut, mereka memanfaatkan untuk memaksa pemerintah atau penguasa untuk memberi konsesi – konsesi politik yang sejalan dengan tujuan – tujuan politik yang mereka inginkan. Dilihat dari segi itu maka, terorisme pada dasarnya adalah suatu taktik psikologis atau perang “ urat syaraf “ dengan dua unsur terpentingnya yaitu kengerian dan publisitas. Kengerian dapat berkembang menjadi suatu histeria irrasional, seperti yang terjadi pada tragedi peledakan Gedung WTC (World Trade Center) yang terjadi pada tanggal 11 September 2001 yang mengakibatkan runtuhnya dua gedung pencakar langit dan mengakibatkan tewasnya lebih dari 6000 orang (Kompas, edisi 13 September 2001).

Serangan terhadap WTC (World Trade Center), bukanlah yang pertama bagi Amerika Serikat. Sebelum itu juga telah terjadi berbagai serangan yang dilakukan oleh kelompok teroris terhadap instalasi – instalasi Amerika Serikat baik di dalam ataupun diluar negeri, antara lain peledakan terhadap Kedutaan Besar Amerika Serikat di Daar al Salam Nairobi, Kenya pada tanggal 7 Agustus 1998, yang menewaskan 12 warga negara Amerika Serikat, serta 212 orang warga Kenya dan Tanzania. Selain itu juga adanya peledakan gedung Alfred P. Murrad di Oklahoma City, Amerika Serikat pada tanggal 9 April 1995 (Arie Ruhyanto, 2002 : 113).

Berkaitan dengan masalah terorisme internasional, sebenarnya pemerintah Amerika Serikat sendiri sebenarnya tidak memaparkan secara resmi atau pasti

tentang definisi terorisme akan tetapi dari definisi yang dikeluarkan beberapa lembaga pemerintahannya, kita dapat melihat bagaimana perspektif Amerika Serikat berkaitan dengan masalah isu terorisme internasional. CIA mendefinisikan terorisme adalah: *"the treath or use of violence for political purpose by individuals or groups, wether acting for, or the option to established intimidate a large group wider than immediate victims"* selain itu menurut CIA dalam laporan tahunan tentang "Pattern of International Terrorism" mendefinisikan Terorisme Internasional sebagai *"Terrorism conducted with the support of foreign nationals, institution, or government"*. (www.defenselink.mil)

Sedangkan menurut the United States Army mendefinisikan terorisme sebagai *"the calculate use of violence or treath of violence to attain goals political or ideological in nature. This is done though intimidation, coercion or installing fear"*. Kemudian *Department Of State* menyimpulkan bahwa terorisme adalah segala bentuk penyerangan terhadap penduduk sipil, personel militer pada saat diluar tugas dan tanpa senjata, ataupun serangan terhadap instalasi militer dan pangkalan militer atau terhadap personel militer ketika mereka sedang tidak berada di tempat (Encyclopedia of Terrorism, 1999: 18) Akan tetapi berbagai pendefinisian tentang terorisme diatas belumlah cukup dijadikan dasar sebagai acuan untuk mengklaim suatu tindakan kekerasan sebagai aksi terorisme. Perspektif Amerika Serikat mengenai masalah terorisme internasional yang selama terus dikembangkan, lebih banyak menguntungkan Amerika Serikat dan digunakan sebagai alat justifikasi tindakan - tindakannya dalam melakukan pembalasan terhadap tindakan - tindakan terorisme yang mengarah pada

kepentingannya, sebagaimana yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Al Qaeda, yang dituduh sebagai pelaku tindakan terorisme internasional sekalipun belum ada bukti bukti yang kongkrit tentang keterlibatan mereka.

Terjadinya berbagai teror dan aksi kekerasan yang semakin terarah dan mengancam terhadap kepentingan Amerika Serikat tersebut, maka mendorong negara tersebut untuk menggalang kekuatan negara – negara sekutunya untuk melakukan aksi penghancuran kekuatan terorisme yang ada di dunia. Selain itu situasi ini juga dimanfaatkan oleh George W. Bush menjadi isu yang sangat strategis bagi kepentingan politik domestik dan global Amerika Serikat.

Oleh karena itu, maka Amerika Serikat kemudian mengambil kebijakan dengan mengeluarkan UU Anti Terrorisme yang dinamakan *USA PATRIOT*, serta menggunakan hak untuk membela diri dari serangan teroris berdasarkan Pasal 51 Piagam PBB (*Pre - Emptive Strike*) serta mengeluarkan Eksekutif Order 13224 yang berisi penutupan dan pembekuan semua aset teroris, selain itu didalamnya juga tercantum daftar nama teroris baik secara perorangan maupun organisasi, yang kemudian juga diadopsi oleh DK PBB (Forum, edisi 10 November 2002). Kemudian Amerika Serikat juga mengeluarkan pernyataan yang menyebutkan negara – negara yang menjadi poros setan, yaitu Irak, Iran, dan Korea Utara yang dianggap sebagai negara yang mendukung dan merupakan pusat terorisme internasional.

Amerika Serikat juga memberi ancaman bagi negara – negara lain di dunia, hal ini tersirat dari pernyataan George W Bush, yang lebih dikenal dengan "*Doktrin Bush*" dimana didalamnya hanya memberi dua pilihan secara hitam

putih kepada bangsa – bangsa didunia, yaitu mendukung Amerika Serikat atau teroris. Artinya, siapapun yang tak mau mendukung perang melawan terorisme secara otomatis dianggap sebagai berpihak kepada kaum teroris, dan tak ada wilayah abu – abu ditengahnya (*grey area*).

Dengan makin gencarnya usaha Amerika Serikat dalam memerangi terorisme maka hal ini juga digunakan oleh negara tersebut sebagai alat propaganda untuk menekan negara lain, kecenderungan ini dapat kita lihat dengan adanya penyerangan terhadap Afghanistan, yang oleh Amerika Serikat dituduh telah melindungi Osama Bin Laden, pimpinan organisasi Al Qaeda yang dianggap sebagai pelaku peledakan WTC (World Trade Center) meskipun belum ada bukti – bukti yang kongkrit. Selain itu Amerika Serikat juga berusaha menekan negara – negara Islam yang dianggap sebagai negara yang subur bagi berkembangnya organisasi terorisme ataupun jaringan organisasi pendukungnya.

Anggapan tersebut tentu saja berimbas pada Indonesia, dimana Indonesia merupakan negara dengan penduduk beragama Islam terbesar di dunia. Hal ini bisa kita lihat dari berita yang diterbitkan oleh harian *The Guardian* yang menyebutkan bahwa sebagai negara yang berpenduduk Islam terbesar didunia maka tentulah Indonesia menjadi tempat paling masuk akal bagi beroperasinya jaringan Al Qaeda. Dalam berita yang berjudul *Islamists in South East Asia Linked to bin Laden* itu, harian tersebut malah menyebut bahwa para pejabat Amerika sudah sangat yakin Al Qaeda sebenarnya telah merencanakan sebuah teror terhadap warga dan kepentingan Amerika Serikat sebelum serangan 11 September 2001 terjadi (Forum Keadilan, Edisi 10 November 2002).

Adanya jaringan organisasi Al Qaeda di Indonesia juga diperkuat oleh pernyataan Dr, Rohan Gunaratna, seorang akademisi dari University of St. Andrews dalam salah satu artikelnya yang dimuat di The Straits Times, yang berjudul "*Jemaah Islamiyah Created as Al Qaeda's Pan - Asia Outfit*", disitu dia mengungkapkan bahwa JI adalah sebuah kelompok yang khusus dibentuk oleh jaringan Al Qaeda untuk menyerang sasaran – sasaran di Asia (The Strait Times, 25 Januari 2002). Pernyataan ini di buktikan dengan adanya bom Bali yang disinyalir dilakukan oleh anggota JI, yang banyak mengakibatkan korban jiwa.

Dengan adanya peristiwa tersebut, tersebut tentu saja berpengaruh terhadap perspektif politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia, sebagaimana ketika terjadi penutupan sementara Kedutaan Besar dan Konjen Amerika di Indonesia pada hari Senin tanggal 9 September 2002 (Arie Ruhyanto, 2002 :98),. Hal ini tentu saja sangat mengejutkan, karena dengan adanya hal tersebut maka mengakibatkan pandangan yang negatif terhadap masalah keamanan di Indonesia. Selain itu dengan adanya *Trovel Ban* yang dikeluarkan oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Indonesia, juga mempengaruhi psikologis dunia internasional yang menganggap negara Indonesia kurang aman dan sangat membahayakan, sehingga dapat mengganggu kegiatan investasi dan pariwisata yang merupakan tulang punggung pemulihan ekonomi nasional yang sedang terkena krisis.

Dengan adanya kebijakan – kebijakan tersebut, maka akan menimbulkan *preseden* buruk, serta akan menimbulkan perubahan dalam hubungan politik luar negeri antara Indonesia dan Amerika Serikat terutama dalam masalah keamanan

dan ekonomi, berdasarkan pada gambaran deskripsi di atas maka penulis mencoba menulis tentang masalah yang belum pernah dikaji sebelumnya tersebut dalam bentuk Skripsi dengan judul :

Pengaruh isu terorisme internasional terhadap perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam bidang pertahanan dan ekonomi

1.2 Ruang lingkup pembahasan

Dalam melakukan analisa pada studi Ilmu Hubungan Internasional, pembatasan ruang lingkup masalah menjadi suatu hal yang amat penting, hal ini bertujuan untuk membatasi masalah agar pembahasannya tidak berkembang terlalu luas sehingga dapat keluar dari pokok permasalahan yang sesungguhnya. Bagi penulis, pembatasan masalah merupakan pedoman kerja, sedangkan bagi pembaca berfungsi untuk mencegah adanya salah pengertian dan kekaburan persoalan.

Hal ini dikemukakan oleh **Sutrisno Hadi** yang menyatakan :

Sekali pokok permasalahan telah ditetapkan, langkah selanjutnya adalah membatasi luasnya dan memberikan formulasi - formulasi yang tegas terhadap pokok persoalan itu. Bagi penyidik sendiri penegasan batas - batas ini akan menjadi pedoman kerja, dan bagi orang lain kepada siapa laporan research ini hendak disajikan atau akan diserahkan. Pembatasan selalu berfungsi mencegah timbulnya keriuhan pendapat dan kekaburan persoalan organisasi (Sutrisno Hadi, 2000:8).

Berdasarkan pada pernyataan diatas, batasan permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini meliputi dua aspek, yaitu aspek batasan waktu dan batasan materi

1.2.1. Batasan Materi

Pada batasan materi, penulis membatasi masalah pada kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Pemerintah Amerika Serikat terhadap Pemerintah Indonesia dalam bidang pertahanan dan ekonomi berkaitan dengan masalah isu terorisme internasional yang saat ini sedang dihadapi oleh dunia internasional saat ini. Kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh Amerika Serikat sangat berpengaruh terhadap proses hubungan luar negeri Indonesia, baik secara bilateral maupun dalam pergaulan internasional. Hal ini karena Amerika Serikat yang dianggap sebagai polisi dunia telah melancarkan serangan balasan terhadap para teroris dengan dibantu oleh negara - negara sekutunya. Operasi Amerika Serikat tersebut tentu saja memerlukan dukungan dari banyak negara, hal ini karena organisasi terorisme telah menyebar dan telah menembus batas - batas negara. Oleh karena itu kebijakan politik luar negeri Indonesia dalam mengatasi masalah terorisme internasional akan sangat mempengaruhi persepsi Amerika Serikat dalam menjalin hubungan luar negeri dengan Indonesia.

1.2.2 Batasan Waktu

Pada batasan waktu penulis akan memulai pembahasan dari tanggal 11 September 2001 dimana pada hari itu telah terjadi sebuah serangan teror yang spektakuler terhadap gedung kembar World Trade Center (WTC) di kota New York yang dimulai pada jam 08. 45 pagi waktu setempat. Aksi teror tersebut dilakukan dengan menabrakkan dua buah pesawat penumpang komersial yang telah dibajak milik maskapai penerbangan American Airlines dan United Airlines yang kemudian ditabrakkan pada kedua gedung tersebut. Selain teror terhadap

gedung WTC, juga telah terjadi serangan terhadap gedung pusat pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) dengan menggunakan pesawat komersial yang telah dibajak dari maskapai penerbangan yang sama yang kemudian juga ditabrakkan ke gedung tersebut. Selain itu, teror juga telah mengancam gedung putih (*White House*) akan tetapi serangan tersebut gagal, karena pesawat yang telah dibajak oleh para teroris jatuh sebelum mencapai sasarannya (Kompas, edisi 13 September 2001).

Dengan adanya peristiwa tersebut maka makin menyadarkan Amerika Serikat akan bahaya terorisme, maka Amerika Serikat berjanji menggalang kekuatan internasional untuk memberantas terorisme. Kampanye yang dilancarkan oleh Amerika Serikat tentu saja sangat berpengaruh terhadap kebijakan politik luar negeri Indonesia, hal ini karena Indonesia juga merupakan korban dari serangan terorisme sebagaimana yang terjadi di Bali. Jadi kerjasama yang dijalin antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat penting pengaruhnya dalam proses pemberantasan terorisme internasional.

Pembahasan materi akan dibatasi sampai dengan tanggal 16 Januari 2003 dimana pada saat itu dikeluarkan sebuah keputusan resmi dari Departemen Kehakiman Amerika Serikat yang menyatakan bahwa semua WNI diwajibkan untuk daftar ulang (*Special Registration*), hal ini tertuang dalam *Federal Register Vol. 68, No. 11 January 16 2003, page 2363 – 2366* (Jawa Pos, edisi 17 Januari 2002). Dengan adanya keputusan ini maka Indonesia digolongkan sebagai negara yang dicurigai sebagai sarang teroris, sejajar dengan Korea Utara, Iran, Irak, Libya dan Pakistan. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh adanya

pengeboman yang dilakukan oleh sekelompok anggota terorisme internasional yang menghancurkan Sari Club dan Paddy's Pub yang terletak di jalan Legian Kuta, Bali yang mengakibatkan banyak korban jiwa warga negara asing.

1.3 Problematika

Problematika atau permasalahan merupakan hal yang mendasar yang harus dibuat oleh setiap penelitian ilmiah. Perumusan masalah akan dapat membantu dalam memberikan pencarian fokus pembahasan.

Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan problematika atau permasalahan sebaiknya kita ikuti pendapat yang dikemukakan oleh para pakar penelitian tentang hal tersebut.

Dalam hal ini **Winarno Surachmad** memberikan pengertian masalah sebagai berikut :

Setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dianalisa sebagai suatu rintangan yang mesti dilalui dengan jalan mengatasinya apabila kita terus jalan (Winarno Surachmad, 1975 :33).

Hal itu juga selaras dengan pendapat Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh **The Liang Gie** yang menyatakan:

Masalah adalah kejadian yang menimbulkan pertanyaan dalam hati kita tentang kedudukannya. Kita tidak puas dengan melihat saja, melainkan kita ingin mengetahui lebih mendalam. Masalah menimbulkan soal yang harus diterangkan oleh ilmu. Ilmu senantiasa menjawab bagaimana dan apa sebabnya (The Liang Gie, 1984 : 49).

Perubahan kebijakan yang mewarnai pola hubungan politik luar negeri antara Amerika Serikat dan Indonesia pasca serangan 11 September 2002, sebenarnya dilandasi oleh adanya ketakutan mendalam yang diakibatkan oleh

serangan terorisme internasional. Hal ini membuat Amerika Serikat yang dianggap sebagai polisi dunia berusaha untuk mengembalikan kewibawaannya sebagai negara super power. Oleh karena itu Amerika Serikat berusaha menumpas semua gerakan terorisme serta menghancurkan negara – negara atau organisasi yang berusaha untuk membantu gerakan terorisme internasional.

Selama ini, Indonesia dianggap oleh Amerika Serikat kurang serius mendukung upayanya dalam memerangi terorisme, hal ini dapat dilihat dalam pernyataan resmi pemerintah Indonesia berkaitan dengan serangan Amerika Serikat terhadap Afghanistan dimana disitu disebutkan pada butir pertama bahwa pemerintah Indonesia mengemukakan keprihatinan yang mendalam terhadap serangan Amerika Serikat ke Afghanistan, hal ini bisa diartikan bahwa Indonesia mengharapkan agar tidak terjadi *military act* (Forum, edisi 10 November 2002).

Selain itu Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar didunia dianggap sebagai sarang terorisme internasional, dimana didalamnya terdapat berbagai kelompok Fundamentalis Islam yang dianggap sebagai embrio dari kelompok teroris dan merupakan musuh bagi Amerika Serikat.

Berdasarkan pernyataan diatas maka masalah yang relevan dengan tema skripsi ini adalah:

Faktor – faktor apa saja yang melatar belakangi sikap Pemerintah Amerika Serikat dalam menerapkan perubahan kebijakan politik luar negerinya terhadap Indonesia pasca serangan 11 September 2001, serta bagaimana pengaruh perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat tersebut terhadap Indonesia

1.4 Kerangka Dasar Teori

Dalam usaha untuk memecahkan masalah yang bersifat ilmiah, maka diperlukan suatu teori yang relevan terhadap masalah yang hendak dipecahkan. Seperti yang diterangkan oleh **Mochtar Mas'oeed**, yaitu "teori adalah suatu bentuk pernyataan yang menjawab pertanyaan " mengapa" yang berarti adalah upaya untuk memberi makna pada fenomena yang terjadi.

Sementara itu menurut **Quincy Wright** mendefinisikan teori sebagai berikut:

Suatu kumpulan yang komprehensif, koheren, dan berhubungan yang memberikan sumbangan bagi penalaran secara pribadi, evaluasi dan kontrol dalam hubungan antara negara dan kondisi dunia (Quincy Wright, 1981 :10).

Berdasarkan dua pendapat ahli tersebut, penulis mendasarkan pada *Decision Making Theory* (Teori Pembuatan Keputusan).

Richard C. Snyder, H.W. Bruck, dan Burton yang mendefinisikan *Decision Making* sebagai berikut :

Decision Making di dapatkan dari serangkaian alternatif urutan tindakan yang dari sejumlah yang terbatas yang ditetapkan secara sosial, dari suatu proyek untuk melahirkan keadaan peristiwa yang khusus pada masa mendatang oleh para pembuat keputusan. Essensi dari setiap pembuatan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan suatu bangsa (Richard C. Snyder, 1962 :90).

Adapun maksud dari penelaahan proses *Decision making* adalah untuk mengetahui apakah dan bagaimanakah proses keputusan mempengaruhi keputusan yang dihasilkan.

Untuk lebih memperjelas hal diatas penulis menggunakan model pembuatan keputusan. **Graham T. Allison** (Mochtar Mas'oeed, 1990:243)

mengajukan tiga model dalam menganalisa politik luar negeri untuk mendiskripsikan proses keputusan luar negeri, yaitu :

Model I : Aktor Rasional

Dalam model ini, politik luar negeri dipandang sebagai akibat dari tindakan – tindakan aktor rasional, yang dilakukan dengan sengaja untuk mencapai suatu tujuan. Pembuatan keputusan politik luar negeri digambarkan sebagai suatu proses intelektual. Perilaku pemerintah dianalogikan sebagai perilaku individu yang bernalar dan terkoordinasi. Dengan demikian analisa politik luar negeri harus memusatkan perhatian pada penelaahan terhadap keputusan nasional dan tujuan dari suatu bangsa, alternatif – alternatif haluan, kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan perhitungan untung – rugi atas masing – masing alternatif tersebut.

Dalam model ini digambarkan bahwa para pembuat keputusan dalam melakukan pilihan atas alternatif – alternatif itu menggunakan kriteria “optimalisasi hasil”. Para pembuat keputusan digambarkan selalu siap untuk melakukan perubahan atau penyesuaian dalam kebijakannya. Mereka juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup banyak sehingga bisa melakukan penelusuran tuntas terhadap semua sumber yang bisa dicapai untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Model II : Proses Organisasi

Model ini menggambarkan politik luar negeri sebagai hasil kerja suatu organisasi besar yang berfungsi menurut suatu pola perilaku. Pembuatan keputusan politik luar negeri bukan semata – mata proses intelektual, tetapi lebih

merupakan proses mekanis yaitu pembuatan keputusan dilakukan secara mekanis merujuk pada keputusan. Keputusan yang telah dibuat pada masa lalu, pada preseden, prosedur rutin yang berlaku, atau pada peran yang ditetapkan bagi unit birokrasi itu. Seperti yang ditulis oleh Allison ketika ia membahas model organisasi ini, apa yang akan terjadi pada waktu sebelumnya.

Model ini punya tiga proposisi. *Pertama*, suatu pemerintah yang terdiri dari sekumpulan organisasi yang secara longgar bersekutu dalam suatu struktur yang berhubungan yang mirip struktur feodal. *Kedua*, keputusan dan perilaku pemerintah bukan hasil dari proses penetapan pilihan secara rasional, tetapi sebagai output atau hasil kerja sejumlah organisasi besar yang bekerja menurut suatu pola perilaku baku. *Ketiga*, setiap organisasi yang memiliki prosedur kerja baku dan program serta bekerja secara rutin, umumnya akan berperilaku sama seperti masa sebelumnya.

Unit analisa dari model ini adalah output-output organisasi pemerintahan, oleh karena itu harus mengidentifikasi lembaga-lembaga mana yang melahirkan tindakan politik itu.

Model III : Politik Birokratik

Dalam model ini politik luar negeri dipandang bukan sebagai hasil proses intelektual yang menghubungkan cara rasional. Politik luar negeri adalah hasil dari proses interaksi, penyesuaian diri dan perpolitikan antara berbagai aktor dan organisasi. Proses ini melibatkan berbagai tawar menawar di arena politik nasional. Dengan kata lain pembuat keputusan politik luar negeri adalah proses sosial bukan proses intelektual.

Perilaku aktor model ini adalah hasil permainan politik dalam membuat dan menerapkan keputusan tersebut. Karena itu yang sering terjadi adalah ketidaksesuaian dengan tujuan yang seharusnya dikejar pemerintah.

Dalam hal ini untuk menganalisa kebijakan politik luar negeri Amerika terhadap Indonesia, penulis menggunakan teori model III, yaitu Politik Birokratik. Hal ini karena, dengan terjadinya serangan 11 September 2001 yang menyebabkan kehancuran hebat pada tingkat fisik pada fasilitas ekonomi, pemerintahan, dan militer Amerika Serikat hal ini juga memiliki efek yang multi dimensional dalam masyarakat Amerika, yakni efek persepsi (*perception effect*), efek psikologis (*psychological effect*), dan efek simbolik (*symbolic effect*).

Aksi teror tersebut telah menimbulkan efek persepsi yang kolosal, berupa terciptanya sebuah persepsi global tentang peristiwa tersebut, yang menarik perhatian dan keingintahuan dan kesadaran massa. Image serangan teroris tersebut, dengan segala kerusakan yang ditimbulkannya dan disiarkan melalui berbagai media massa telah menjadikan aksi terorisme tersebut sebagai sebuah "tontonan global". Aksi teror tersebut juga berhasil menimbulkan efek psikologis yang mendalam, berupa ketakutan (*fear*), panik (*panic*), dan trauma yang sangat dalam, tidak saja secara lokal tetapi juga global.

Dengan adanya aksi terorisme yang dahsyat tersebut menimbulkan reaksi yang keras di masyarakat, Presiden Amerika Serikat George W. Bush dalam pidatonya didepan Konggres, pada hari Rabu 20 September 2001, mendesak dunia untuk mendukungnya menghadapi terorisme internasional. George W. Bush juga menuntut agar Amerika Serikat diberikan akses penuh ke kamp – kamp teroris,

sehingga dapat memastikan agar mereka tidak bisa beroperasi lagi. Dalam kaitannya dengan hal ini, Konggres menyetujui alokasi dana sebesar 40 milyar dolar AS sebagai paket darurat untuk memenuhi kebutuhan militer dalam merespon serangan teroris terhadap Amerika Serikat. (www.whitehouse.gov/news)

Pada tanggal 18 September 2001, George W. Bush menandatangani resolusi Konggres yang memberikan wewenang kepada militer Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap setiap pihak yang berada di balik serangan 11 September 2001. George W. Bush juga menandatangani dana bantuan sebesar 40 miliar dollar untuk biaya segala kebutuhan dalam menangkal terorisme. Tindakan George W. Bush tersebut juga mendapat dukungan penuh dari rakyat Amerika Serikat.

Untuk mengakomodir semua aspirasi rakyat tersebut, serta untuk mengembalikan legitimasinya, maka George W. Bush mengeluarkan kebijakan politik luar negeri yang didasarkan pada Piagam PBB pasal 51, yaitu dengan kebijakan *Pre-emptive strike* dimana disitu disebutkan bahwa suatu negara berhak menggunakan hak beladirinya (*right of self defence*), apabila negara tersebut mendapat ancaman serangan yang sudah ada di depan mata (*imminent attack*). Dalam *Pre-emptive strike*, pihak yang merasa terancam dapat melakukan serangan lebih dulu terhadap pihak yang dianggapnya mengancam.

Selain itu Pemerintah Amerika Serikat juga membuat sebuah Undang - undang Anti - Terrorisme yang dinamakan *USA PATRIOT (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act)*. Dengan Undang - undang ini maka Presiden Amerika

Serikat mempunyai wewenang untuk menjatuhkan sanksi politik termasuk embargo ekonomi kepada negara yang tak mendukung perang terhadap terorisme. Sebelumnya, embargo hanya bisa dilakukan bila mendapat persetujuan dari PBB, tapi sekarang dengan adanya UU tersebut maka Amerika Serikat bisa menjatuhkan sanksi kepada negara yang tidak sepenuhnya membantunya. Pemerintah juga diberi hak untuk membekukan aset warga atau pemerintah negara asing yang berada di Amerika Serikat, jika orang atau pemerintah tersebut dicurigai terlibat aksi terorisme, pemerintah juga diberi hak untuk melarang warga negaranya untuk bepergian ke negara - negara yang dicurigai terlibat terorisme. Disamping itu, Pemerintah Amerika Serikat juga diberi wewenang untuk mencekal warga negara asing yang berasal dari negara - negara yang dituduh negara teroris untuk masuk ke negara tersebut. (www.whitehouse.gov/news)

Dengan adanya kebijakan - kebijakan tersebut, berimbas pada pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia, hal ini dapat kita lihat dengan adanya kebijakan yang melarang warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia (*Travel Ban*), selain itu dengan adanya penutupan sementara Konjen serta Kedubesnya di Indonesia tentu berdampak buruk dalam hubungan politik luarnegeri serta persepsi internasional terhadap Indonesia. Hal ini diperburuk dengan adanya kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang mengharuskan Registrasi ulang (*special registration*) bagi warga negara Indonesia yang ada di Amerika, hal ini berarti telah secara eksplisit mensejajarkan Indonesia dengan negara - negara terorisme seperti Irak, Iran Libya.

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat dalam penumpasan gerakan terorisme pasca serangan 11 September 2001 dibawah pemerintahan George W. Bush terkesan sangat ofensif dan over acting, hal ini dilatar belakangi oleh adanya sikap George W. Bush yang dikelilingi orang - orang yang beraliran konservatif dan cenderung militeristik. Selain itu ia juga berusaha untuk meyakinkan serta mempertahankan kredibilitasnya dimata rakyat dan berusaha mengembalikan kepercayaan diri rakyatnya. Dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat telah terjadi tarik menarik kepentingan antara berbagai elemen baik dalam birokrasi, parlemen ataupun dalam kelompok kepentingan. Oleh karena itu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat merupakan hasil kompromi antar berbagai elemen masyarakat yang memiliki kepentingan berbeda dan terakomodir menjadi sebuah kebijakan politik yang dapat memuaskan semua pihak.

Sedang untuk lebih mempertajam analisa, maka penulis menggunakan konsep terorisme, sebagai mana yang diungkapkan James Adam bahwa :

Terorisme adalah penggunaan atau ancaman kekerasan fisik oleh individu-individu atau kelompok – kelompok untuk tujuan – tujuan politik, baik untuk kepentingan atau untuk melawan kekuasaan yang ada, apabila tindakan-tindakan terorisme itu dimaksudkan untuk mengejutkan, melumpuhkan, atau mengintimidasi suatu kelompok sasaran yang lebih besar dari pada korban – korban langsungnya. Terorisme melibatkan kelompok – yang berusaha untuk menumbangkan rezim – rezim tertentu, untuk mengoreksi kelompok nasional, atau untuk menggerogoti tata politik internasional (James Adam, 1986 : 6).

Terorisme sebenarnya merupakan suatu hal yang masih menjadi perdebatan, hal ini karena tidak adanya definisi yang jelas tentang hal tersebut. Tidak adanya kesepakatan tentang terorisme internasional, menimbulkan

keraguan dalam melakukan tindakan pemberantasan ataupun pencegahannya. Sehingga yang terjadi kemudian justru terjadi agresi yang menggunakan terorisme sebagai kedok, seperti yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Afghanistan yang dituduhan melindungi Osama Bin Laden, pemimpin organisasi Al Qaeda yang dituduh sebagai pelaku pengeboman WTC (World Trade Center) pada tanggal 11 September 2001, tanpa disertai bukti - bukti yang kuat.

1.5 Hipotesis

Hipotesis disusun untuk memberikan jawaban sementara yang dalam analisa lebih lanjut perlu dibuktikan kebenarannya. Dalam proses selanjutnya, hipotesa akan diverifikasi untuk mendapatkan kesimpulan yang sebenarnya. Hipotesa amat dibutuhkan untuk menemukan alternatif dari berbagai dugaan yang mendekati kebenaran.

Winarno Surachmad menyatakan, hipotesis merupakan perumusan jawaban sementara dalam suatu penyelidikan untuk mencari jawaban sebenarnya (Winarno Suracmad, 1975 :33).

Berdasarkan permasalahan yang penulis ketengahkan dalam skripsi ini, maka Hipotesis atau jawaban sementara dari permasalahan diatas adalah :

Isu terorisme internasional berpengaruh pada perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dalam bidang pertahanan dan keamanan, hal ini diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain, adanya perubahan paradigma Amerika Serikat dalam memandang hubungan antar bangsa dalam tatanan pergaulan internasional pasca serangan 11 September 2001 yang diukur dari seberapa besar suatu negara memiliki

komitmen dalam memberantas terorisme internasional. Selain itu juga dipengaruhi oleh adanya berbagai kepentingan dalam birokrasi pemerintahan serta adanya berbagai tekanan dari berbagai kelompok kepentingan (diantaranya MNC dan MIC) dan media massa dalam usaha untuk memerangi terorisme. Hal ini terjadi karena, saat ini Indonesia dianggap kurang serius dalam mendukung Amerika Serikat dalam memerangi terorisme, oleh karena itu perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat bertujuan untuk menekan Indonesia, agar lebih serius dalam memerangi terorisme baik domestik ataupun internasional, karena Amerika Serikat sadar, tanpa adanya kerjasama dengan Indonesia maka usaha menumpas terorisme internasional tidak akan efektif, khususnya di Asia Tenggara yang disinyalir sebagai salah satu basis organisasi Al Qaeda

1.6 Metode Penelitian

Dalam suatu karya ilmiah, metode merupakan salah satu syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Metode tersebut meliputi teknik pengumpulan data dan teknik penulisannya. Dengan diterapkannya suatu metode mempunyai manfaat untuk mendapatkan suatu kerangka berfikir dan data – data yang dibutuhkan secara memadai agar karya tulis memiliki bobot ilmiah.

Secara umum, pengertian metode menurut **Winarno Surachmad** adalah sebagai berikut :

Metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan, misalnya untuk menguji suatu rangkaian hipotesa dengan menggunakan teknik serta alat – alat tertentu. Cara utama ini digunakan setelah penyelidikan memperhitungkan kewajarannya ditinjau dari tujuan

penyelidikan serta dari situasi penyelidikannya (Winarno Surachmad, 1975 :121).

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode atau cara mencakup :

1.6.1 Tahap Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian dengan cara studi pustaka, yaitu dengan mengkaji sumber - sumber tertulis yang ada di berbagai literatur serta melengkapinya dengan data - data terbaru.

Penulis mengambil data tersebut dari buku teks, internet, jurnal serta sumber lain yang berkaitan dengan penulisan karya tulis ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, penulis melakukan penelitian ke berbagai perpustakaan antara lain :

1. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember.
2. Perpustakaan Pusat Universitas Jember.
3. Perpustakaan Lembaga Ilmu pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta
4. Internet.

1.6.2 Tahap Analisis data

Bila yang diperlukan telah didapatkan, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisa data yang telah diperoleh tersebut. Dalam hal ini penulis menggunakan cara berfikir deduktif. Menurut **Mochtar Mas' oed** cara berfikir deduktif adalah :

Menarik prinsip umum dengan menghasilkan prinsip - prinsip yang lebih rendah sehingga sesudahnya kita bisa menguji masing - masing proposisi dengan menelaah peristiwa - peristiwa khusus untuk melihat apakah kasus itu bisa dijelaskan dengan diramalkan dengan teori - teori yang telah ditetapkan (Mochtar Mas' oed, 1990 :82).

Berdasarkan pada data yang ada, serta menggunakan cara berfikir diatas penulis akan menganalisa pengaruh terorisme internasional terhadap perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia.

1.7 Pendekatan

Pendekatan dalam karya tulis ini digunakan untuk membantu mempertajam analisa sehingga permasalahan dalam penelitian ini dapat dilihat dari sudut yang lebih spesifik, **The Liang Gie** menjelaskan bahwa :

Pendekatan adalah keseluruhan sikap penyelidikan, sudut pandang, ukuran, pangkal duga, dan kerangka dasar pemikiran yang dipakai untuk mendekati suatu sasaran dan memahami pengetahuan yang teratur dan bulat mengenai sasaran dan telaah (The Liang Gie, 1984 :82).

Berdasarkan hal diatas, pendekatan yang relevan untuk digunakan pada skripsi ini adalah pendekatan **Realis** . Menurut Morgenthau realisme dibangun dengan keyakinan bahwa(Morgenthau,1993:13):

“Dunia yang dibangun dari sudut pandang rasional bersifat tidak sempurna, merupakan hasil dari kebutuhan – kebutuhan dari sifat manusia untuk meningkatkan kehidupan dunia. Seseorang harus bekerja dengan kekuatan – kekuatan tersebut dan bukan melawannya. Didunia yang tidak terpisahkan dari adanya kepentingan – kepentingan yang berlawanan serta konflik – konflik kepentingan yang berlawanan, maka prinsip – prinsip moral pada akhirnya tidak akan pernah dapat direalisasikan secara sepenuhnya akan tetapi prinsip – prinsip tersebut sedapat mungkin harus disebutkan dengan tetap melalui perimbangan kepentingan yang bersifat sementara serta melalui penyelesaian konflik – konflik yang selalu bersifat

tidak penuh. Mazhab ini menganggap *system check and balance* sebagai suatu prinsip universal bagi semua masyarakat yang bersifat *pluralistic*. Mazhab ini lebih tertarik pada prosedur – prosedur sejarah dan bukan pada prinsip abstrak serta dimaksudkan untuk sejauh mungkin memperkecil kejatuhan dan bukannya menciptakan kekuatan mutlak.

Dalam pendekatan realis terdapat empat prinsip utama dalam mengkaji suatu fenomena yaitu (Morgenthau,1990:4-23):

1. Pandangan realisme politik dikendalikan oleh hukum – hukum objektif yang berakar pada hakikat manusia, sehingga dapat membedakan antara kebenaran dan pendapat, antara yang benar secara rasional dan objektif, didukung oleh bukti dan diperjelas dengan alasan, atau hanya penilaian subjektif yang terpisah dari fakta dan diilhami oleh praduga serta khayalan.
2. Negarawan berpikir dan bertindak dalam sebuah pengertian kepentingan yang didefinisikan sebagai kekuasaan / kekuatan.
3. Corak kepentingan yang menentukan tindakan politik dalam sebuah periode sejarah tertentu yang tergantung dari konteks politik dan kebudayaan.
4. Realisme politik menyadari pentingnya nilai moral dalam tindakan politik, meskipun prinsip – prinsip moral yang universal tidak dapat diterapkan pada tindakan negara tetapi terlebih dulu harus disaring melalui keadaan, waktu dan tempat yang kongkret serta konsekuensi politik yang menyertainya.

5. Realisme politik menolak mengidentifikasi cita – cita moral bangsa tertentu dengan hukum – hukum moral yang menguasai alam semesta. Kaum realis mampu menilai bangsa lain sebagaimana menilai bangsa mereka sendiri, setelah itu maka mereka mampu meneruskan tindakan politik yang menghormati kepentingan bangsa lain serta melindungi dan memajukan kepentingan bangsa mereka sendiri.

6. Kaum realis secara intelektual selalu mempertahankan otonomi dunia politik dan menempatkan norma – norma lain berada dibawah norma – norma politik.

Dari adanya hal diatas maka kita dapat melihat bahwa sebuah bangsa akan dapat mempertahankan eksistensinya dalam tata pergaulan internasional jika bangsa tersebut memiliki power. Hal ini dapat kita gunakan sebagai referensi untuk mengkaji perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia berkaitan dengan adanya ancaman terorisme internasional.

BAB II



POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN HUBUNGANNYA DENGAN TERORISME INTERNASIONAL

2.1 Prinsip Dasar Politik Luar Negeri Amerika.

Amerika Serikat sebagaimana negara – negara lain di dunia memiliki kebijakan politik luar negeri yang menunjukkan ekspresi umum bagi negara tersebut terhadap lingkungan eksternalnya (internasional), dan merupakan bagian dari strategi dasar untuk mencapai tujuan nasional serta internasional atau bahkan digunakan juga sebagai alat untuk mengatasi dan melindungi dari ancaman terhadap eksistensi negaranya.

Dalam menetapkan politik luar negeri, perubahan yang terjadi di lingkungan internasional (eksternal) dan dalam negeri (internal) suatu negara merupakan faktor – faktor yang signifikan dan perlu diperhatikan oleh para pengambil keputusan. Hal ini karena, adanya korelasi antara perubahan yang terjadi di lingkungan external dan internal dengan perubahan politik luar negeri suatu negara, dengan adanya korelasi tersebut maka akan menghasilkan suatu keputusan dan perilaku politik luar negeri yang bersifat adaptif terhadap lingkungan.

Dalam perjalanan sejarah politik luar negeri Amerika Serikat, terjadi perdebatan antara realisme dan idealisme dalam politik luar negeri Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak awal abad 20. Visi utama politik luar negeri Amerika Serikat pada masa itu yang dikemukakan oleh golongan idealis adalah

untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional, adanya keinginan untuk terus meningkatkan kerjasama antara negara, menjauhkan penggunaan kekerasan (militer) dalam penyelesaian sengketa internasional serta mendukung pencapaian demokrasi sebagai prasarat terbentuknya perdamaian internasional. Namun dengan pecahnya perang dunia ke II maka hal itu menjadi bukti kegagalan dari aliran idealis dalam pelaksanaan politik luar negeri Amerika Serikat dan politik internasional.

Setelah perang dunia ke II berakhir maka kemudian muncullah pandangan realis yang mencoba mengoreksi dan memperbaiki kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Politik internasional dalam pandangan kaum realis merupakan suatu proses hubungan antara negara, yang masing – masing memiliki tujuan untuk merebut kekuasaan (*struggle for power*). Realisme politik didasarkan pada beberapa asumsi pokok yaitu :

1. Bahwa negara – negara dalam sistem yang berpusat pada suatu negara yang merupakan aktor utama.
2. Bahwa politik domestik dapat dipisahkan dari kebijakan politik luar negeri.
3. Politik internasional adalah pergulatan merebut kekuasaan dalam sebuah lingkungan internasional yang anarkhis. (James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraff, 1990:81)

Dalam pengambilan keputusan politik luar negeri, golongan realis lebih menekankan pada supremasi power (ideologi politik, militer, ekonomi) hal ini kemudian menciptakan sistem internasional bipolar, yang konfrontatif dengan Soviet.

Selain itu realis juga berasumsi bahwa prinsip – prinsip moral tidak dapat diterapkan untuk memahami perilaku politik suatu negara. Kalangan realis menolak penerapan prinsip – prinsip moral dalam analisis politik internasional hal ini karena adanya perbedaan yang mendasar antara politik internasional dan politik domestik. (Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thomson,1985:7) Ditingkat domestik terdapat otoritas sentral yang dapat mengatur moralitas individu, sementara di dunia internasional tidak ada otoritas sentral yang dapat mengatur kehidupan negara karena hubungan antar negara berlangsung dalam lingkungan anarkhis. Oleh karena itu maka berdasarkan logika diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan politik luar negeri merupakan aktifitas yang terjadi diluar batas – batas wilayah nasional dan bukan merupakan urusan domestik. Hal inilah yang mengakibatkan Amerika Serikat pada masa itu sangat ofensif dalam menjalankan politik luar negerinya. (Fareed Zakaria,1992:178)

Setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet, maka muncullah koreksi terhadap politik luar negeri Amerika Serikat yang selama ini banyak dipengaruhi oleh paradigma realis. Hal ini karena politik realis dianggap telah gagal mengantisipasi berakhirnya perang dingin, selain itu realis juga dianggap telah mengabaikan pertimbangan domestik dalam menganalisa kebijakan politik luar negeri. Padahal pertimbangan politik domestik pada dasarnya dapat membantu menjelaskan kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu kemudian muncullah kalangan - kalangan yang memiliki paradigma liberalis yang mencoba untuk memperbaiki kebijakan – kebijakan politik luar negeri

perusahaan – perusahaan nasional dan multinasional (EXXON, Freeport, dll) dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Secara garis besar, dalam konteks politik luar negeri Amerika Serikat terdapat berbagai strategi yang digunakan dalam proses pencapaian tujuan politik luar negerinya yaitu antara lain :

Strategi pertama, adalah world idealis. Strategi ini mengemukakan bahwa ancaman utama bagi kepentingan nasional Amerika Serikat bukanlah merupakan ancaman militer dari negara lain akan tetapi berupa permasalahan global (non military threats) seperti kerusakan lingkungan hidup, tidak terjaminnya kehidupan demokrasi, penyalahgunaan hukum, penyelundupan narkoba dan kemiskinan. Oleh karena itu Amerika Serikat bersama – sama dengan negara lain perlu lebih memfokuskan usaha – usaha global untuk menangani permasalahan – permasalahan di atas.

Kedua, adalah strategi neo – isolationism. Strategi ini mengemukakan bahwa Amerika Serikat memiliki ancaman militer yang sangat kecil, sehingga dengan kekuatan militer yang terbataspun maka negara tersebut masih dapat mengatasinya. Dengan adanya hal yang demikian maka keterlibatan Amerika Serikat dalam masalah – masalah politik keamanan internasional akan sangat terbatas.

Ketiga, adalah strategi disengagement yang menginginkan Amerika Serikat untuk tidak terlibat sama sekali dalam kancah politik internasional. Dengan tidak melibatkan diri dalam politik Internasional maka Amerika Serikat diharapkan dapat memfokuskan pembangunan domestik sebagai upaya untuk

membangun kembali negara tersebut sebagai negara adidaya. Beberapa permasalahan krusial yang harus lebih dulu diatasi antara lain masalah agenda pembangunan ekonomi dan politik domestik Amerika Serikat perlu diatasi terlebih dahulu sebelum bangkit kembali sebagai negara adikuasa.

Keempat adalah strategi global containment, yang mengharapkan Amerika Serikat tetap mempertahankan atau bahkan jika mungkin dapat meningkatkan komitmennya terhadap isu – isu crucial dalam politik luar negerinya, seperti pembendungan terhadap berbagai nilai – nilai ideologi dan kondisi – kondisi yang dapat mengancam kepentingann Amerika Serikat dan stabilitas dunia. Strategi ini menuntut Amerika Serikat untuk muncul sebagai pemimpin global dengan menggunakan berbagai sarana yang dimilikinya untuk melindungi dan menjaga semua kepentingannya baik yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Strategi ini memperbolehkan sarana – sarana diplomatis baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multi lateral dan ataupun penggunaan sarana – sarana non diplomatis (misalnya penggunaan kekuatan militer) yang bersifat unilateral dalam proses pencapaian tujuan politik luar negerinya.

Strategi yang kelima adalah, strategi rollback yang bertujuan untuk terus mengeliminasi kemungkinan - kemungkinan bangkitnya ancaman komunisme. Hal ini dapat dilakukan dengan terus mengembangkan dan memasyarakatkan prinsip – prinsip kehidupan demokratis di seluruh penjuru dunia. Hal ini dikerenakan demokratisasi merupakan kunci untuk dapat menciptakan tatanan dunia yang lebih baik. Hal ini membuktikan bahwa sekalipun Uni Soviet telah runtuh bukan berarti Amerika Serikat dapat mengendorkan kewaspadaannya

terhadap negara – negara yang masih menganut ideologi komunisme. (Anak Agung Bayu Perwita, 1996:567-572)

2.2 Perkembangan Politik Luar Negeri Amerika

Secara historis terjadi evolusi dalam politik luar negeri Amerika Serikat yang terbagi dalam beberapa fase :

1. Era Perang Dingin.

Perang dingin berawal ketika Berlin terbagi menjadi dua bagian yang mengakibatkan ketegangan di kawasan Eropa Timur yang kemudian berkembang ke seluruh kawasan di dunia. Sepanjang perang dingin terjadi persaingan yang intensif antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, secara umum kondisi politik internasional pada masa perang dingin merupakan manifestasi persaingan kedua negara adidaya tersebut untuk mendapatkan hegemoni global. Prinsip politik luar negeri Amerika Serikat pada masa perang dingin sangat didominasi oleh keinginan untuk membendung penyebaran kekuatan komunis yang dimotori oleh Uni Soviet. Politik luar negeri Amerika Serikat pada saat itu sulit dipisahkan dengan kebijakan keamanan nasionalnya yang sangat menekankan pada kekuatan militer sebagai langkah *deterrence* terhadap kekuatan politik - militer Uni Soviet. Pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat percaya bahwa tindakannya untuk melindungi negara lain secara militer dan pembentukan aliansi militer secara tidak langsung akan meningkatkan keamanan nasionalnya serta dapat mengurangi ancaman dari Uni Soviet.

Pada saat itu maka kemudian lahir politik pengepungan (*containment policy*). Politik ini bertujuan untuk membendung pelebaran pengaruh dan

kekuatan Uni Sovyet dan merupakan tonggak awal kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pasca PD II. Dengan berdasar pada doktrin Truman yang digunakan sebagai dasar untuk meyakinkan publik Amerika betapa pentingnya untuk menghambat pengaruh Uni Sovyet yang semakin agresif, dibuktikan dengan keberhasilan Soviet dalam menanamkan pengaruhnya di kawasan Eropa timur. (John G. Stoessinger, 1979:61)

Untuk menangkal terus berkembangnya pengaruh komunisme tersebut Amerika Serikat kemudian melancarkan program Marshal Plan, yang merupakan bantuan ekonomi untuk membangun kembali Eropa dari reruntuhan perang. Program Marshal Plan diarahkan untuk menciptakan kembali kemakmuran negara – negara Eropa, akan tetapi sebenarnya program tersebut memiliki implikasi politik yang sangat jauh, yaitu :

• *Pertama*, program tersebut dirancang untuk menekan kekuatan politik pro – komunis yang tumbuh subur ditengah kondisi ekonomi yang sangat buruk. Tanpa adanya bantuan ekonomi tersebut dikhawatirkan kelompok pro – komunis dapat memenangkan pemilu- pemilu di Eropa.

Kedua, dengan Marshal Plan Amerika Serikat dapat menekan Inggris dan Perancis agar menyatukan zona wilayah mereka di Jerman agar terbentuk negara Jerman Barat. Persyaratan ini diperlukan agar Amerika Serikat dapat dengan mudah memusatkan seluruh strategi pemulihan Eropa untuk mewujudkan tumbuhnya kawasan Eropa Barat yang bebas dari komunis. (Robert J. Art, 1989:131)

Pada masa ini timbul juga akses global dari kebijakan politik *balance of power* (perimbangan kekuatan), yang menimbulkan adanya persaingan monolitas

dalam hal persenjataan strategis antara Amerika Serikat dan Soviet yang makin meruncing, hal ini menimbulkan perjanjian yang menyangkut pada dua bidang utama yaitu:

1. Persenjataan strategis interkontinental yang diakomodir dalam perundingan SALT (The Strategic Arm Limitation Talks) dan berkembang menjadi START (Strategic Arms Reduction Talks)
2. Perundingan mengenai rudal nuklir jarak menengah INF (Intermediate Nuclear Forces) yang dimulai akhir 1981. Juga masalah pengawasan dan pengurangan kekuatan konvensional di medan Eropa, MBFR (Mutual and Balanced Forced Reduction), meskipun tidak segegar INF dan START.(Indrya Smita Notosusanto,1996:68)

Konfrontasi dan perlombaan senjata serta ruang angkasa yang sangat tajam mengakibatkan ambruknya perekonomian Soviet, yang kemudian disusul dengan runtuhnya negara Uni Soviet yang menandai berakhirnya perang dingin.

3. Pasca Perang dingin

Pada masa pasca perang dingin yang ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin dan runtuhnya negara adidaya Uni Soviet, membuat para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat kehilangan ancaman yang paling serius. Hilangnya ancaman komunisme, membuat para pembuat kebijakan politik luar negeri kehilangan konsensus yang fundamental dalam menentukan agenda kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Hal ini mengakibatkan semakin tipisnya batas antara persoalan dalam negeri dan internasional yang kemudian memunculkan *intermestic issues*, yaitu isu internasional yang berinteraksi kuat

dengan isu – isu domestik. Isu – isu demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia adalah isu – isu intermestic. Yang bukan saja menjadi persoalan dalam negeri suatu bangsa, tetapi juga menjadi persoalan bagi bangsa – bangsa lain yang dengan sendirinya menciptakan dampak pada kebijakan politik luar negeri suatu bangsa. Gejala seperti ini membuat batas antara faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu bangsa menjadi kabur. Perubahan ini ternyata juga mempengaruhi dan menentukan arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat sehingga muncul gejala untuk menginternasionalisasikan isu – isu demokrasi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia yang merupakan faktor pembentuk arah kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat.

Politik luar negeri Amerika Serikat mengalami pergeseran yang berarti, pada dekade 90 – an sebagaimana yang diungkapkan oleh Menlu Warren Christopher yaitu : *pertama* , mempertahankan kepemimpinan global Amerika baik dalam bidang politik, keamanan, dan ekonomi. Kepemimpinan global merupakan hal yang essensial bagi Amerika Serikat untuk menjaga stabilitas dan perdamaian internasional dalam upaya menciptakan tata dunia baru. *Kedua*, mempertahankan pola interaksi yang konstruktif dengan bebarbagai negara kuat di dunia yang menagacu pada kepentingan ekonomi Amerika Serikat terhadap negara – negara tersebut. *Ketiga* memperkuat berbagai institusi internasional sebagai mekanisme penyelesaian berbagai masalah internasional secara damai. *Keempat*, memperluas penyebaran nilai – nilai demokrasi di seluruh dunia sebagai prasyarat utama terciptanya perdamaian internasional. (Indrya Smita Notosusanto1996:108)

Dengan adanya pergeseran isu politik tersebut maka membuat rakyat Amerika

Serikat mulai kurang tertarik dengan isu keamanan internasional yang selama ini menjadi perhatian utama. Hal ini di tunjang dengan terjadinya krisis ekonomi di Amerika Serikat, yang semakin menarik perhatian publik untuk lebih memperbaiki kondisi tersebut. Hal ini dimanfaatkan oleh Clinton untuk meraih popularitas, dan kemudian menjadi presiden Amerika Serikat dengan agenda utama memprioritaskan perbaikan ekonomi. Hal ini tercermin dari pernyataannya " *Foreign policy in large measure will come into play as it affect the economy*".

Secara garis besar politik luar negeri Clinton difokuskan dalam upaya memperluas kawasan – kawasan demokrasi yang merupakan usaha untuk memperkecil upaya kebangkitan komunisme yang dapat mengancam demokrasi. Selain itu pemerintah Clinton juga menggariskan kebijakan politiknya pada tujuh aspek kepentingan nasional seperti yang dikemukakan oleh *National Security Adviser* yaitu:

1. Untuk mempertahankan Amerika Serikat, warganya baik didalam maupun diluar negeri, para sekutu Amerika Serikat dari segala bentuk serangan langsung.
2. Untuk mencegah timbulnya agresi yang dapat mengganggu perdamaian internasional
3. Mempertahankan dan menyebarluakan nilai – nilai demokrasi
4. Menjaga rasa percaya dunia internasional terhadap Amerika Serikat oleh karena itu Amerika Serikat harus selalu mempertahankan komitmen – komitmen internasionalnya.

5. Memerangi kemiskinan, kelaparan, serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa sebenarnya fokus utama dari kebijakan luar negeri Clinton adalah masalah ekonomi. Hal ini bisa tercermin dari keberhasilan perjanjian NAFTA pada tahun 1993 dan suksesnya pertemuan APEC tahun 1994. (Anak Agung Bayu Perwita, 1996:538)

Setelah mengalami berbagai perubahan dalam kebijakan politik luar negeri, Amerika Serikat mulai mampu bangkit dari krisis ekonomi hal ini tentu saja sangat membahagiakan publik Amerika, hal ini juga didukung oleh makin kondusifnya kehidupan demokrasi serta perdamaian dunia.

Pasca Serangan 11 September

Namun keadaan politik dan keamanan kemudian mengalami perubahan yang sangat mendasar, diakibatkan oleh adanya serangan terorisme pada tanggal 11 September 2001 (lebih dikenal dengan tragedi 11 September "Black September"). Setelah adanya kejadian tersebut terjadi perubahan yang drastis terhadap kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan George W Bush, yang mengeluarkan serangkaian pernyataan perang terhadap terorisme dan menuntut semua negara di dunia untuk mengutuk dan memerangi terorisme. Sedangkan bagi negara – negara yang tidak bersedia mengikuti ajakannya ia merencanakan agar berhati – hati.

Dalam pernyataannya tentang strategi baru keamanan Amerika Serikat yang dikemukakan George W. Bush pada pidatonya di depan Kongres, ia mengungkapkan bahwa strategi keamanan nasional Amerika Serikat yang baru

akan didasarkan pada internasionalisasi Amerika Serikat yang dapat merefleksikan kesatuan nilai dan kepentingan nasionalnya sendiri yang meliputi :

1. Usaha dalam memerangi terorisme internasional.

Perang melawan terorisme (yang menggunakan prinsip radikalisme dan teknologi) adalah perang yang tidak terbatas waktu dan Amerika Serikat siap membantu negara – negara yang membutuhkan dukungan untuk melawan terorisme. Hal ini karena terorisme merupakan musuh peradaban dunia, oleh karena itu Amerika Serikat dan negara – negara didunia harus bekerja sama memerangi terorisme dan tidak boleh membiarkannya berkembang luas. Amerika Serikat akan membuat pertahanan untuk penanggulangan pembuatan dan pengiriman misil – misil balistik, serta akan bekerjasama dengan bangsa lain untuk mencegah teroris mengembangkan teknologi penghancur massa.

2. Mengenai senjata pemusnah massal.

Amerika Serikat menganggap saat ini senjata pemusnah massal telah dijadikan musuh sebagai alat untuk menyerang Amerika, hal ini berbeda dengan saat perang dingin. Oleh karena itu Amerika Serikat harus mempersiapkan diri sebelum mereka berhasil menggunakan senjata pemusnah massal untuk menyerang bangsa dan Amerika Serikat. Kita harus membuat tekanan yang baru, inovasi kekuatan militer, teknologi modern termasuk pengembangan sistem pengamannan missil dan penekanan terhadap koleksi intelektual dan analisis.

Pada saat ini Amerika Serikat harus mewaspadaai negara – negara yang dicurigai sebagai penghasil senjata nuklir, senjata biologis, missil balistik, dan

negara yang mengembangkan senjata kimia, seperti Korea Utara dan Irak. Mereka akan menjadi ancaman yang besar bagi Amerika Serikat dan perdamaian dunia.

3. Aliansi dalam memerangi terorisme internasional.

Amerika Serikat sadar bahwa tidak dapat menciptakan perdamaian dunia yang aman sendirian, oleh karena itu Amerika Serikat akan beraliansi dengan institusi – institusi dunia seperti PBB, WTO, OAS (the Organization of American States). Namun begitu Amerika Serikat akan bertindak dengan kekuatan sendiri lepas dari institusi ini jika terjadi perubahan yang tidak sesuai dengan nilai – nilai dan kepentingan Amerika Serikat.

3. Peningkatan Kekuatan Militer

Sudah waktunya untuk menegaskan kembali peranan Amerika Serikat yang sangat essential dalam kemiliteran. Mengembangkan dan membangun kekuatan militer, merupakan prioritas tertinggi kegiatan militer Amerika Serikat terutama adalah untuk melindungi negara dan bangsa Amerika Serikat. Oleh karena itu Amerika Serikat harus meningkatkan kemampuan dan persenjataan militer untuk mematahkan serangan dari musuh – musuh .

4. Menciptakan kebebasan.

Kebebasan adalah kebutuhan manusia yang tidak bisa ditawar – tawar lagi. Saat ini kebebasan telah terancam oleh perang, kepentingan negara serta terorisme. Amerika Serikat memikul tanggung jawab yang besar untuk mengembalikan kebebasan dan menciptakan perdamaian dunia.

(www.newsweek.com)

Dengan adanya Doktrin Bush tersebut, sebagai salah satu landasan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, maka mengakibatkan pola kebijakan negara tersebut lebih ofensif dalam memerangi terorisme. Terjadinya serangan 11 September mendesak pemerintah George W. Bush untuk mengembangkan strategi kebijakan politik luar negeri yang bersifat uniteralis yang sebenarnya hampir sama dengan isolasionis. Menurut G. John Ikenberry, seorang pakar bidang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat mengatakan bahwa, George W. Bush saat ini sedang menerapkan strategi *neo imperialisme*. (G. John Ikenberry, 2002: 49) Strategi ini terdiri dari beberapa unsur penting yaitu :

Pertama, komitmen yang tinggi untuk menjaga dan memelihara dunia unipolar (*commitment to maintaining a unipolar world*). Hal ini karena dengan munculnya Amerika Serikat sebagai satu – satunya kekuatan militer, politik, ekonomi terkuat di dunia, Amerika bertekad untuk tidak membiarkan munculnya kekuatan tandingan di manapun di seluruh pelosok dunia.

Kedua, dimunculkannya definisi baru tentang ancaman global (*a new analysis of global threat*). Hal ini tidak jauh beda dengan masa lalu, jika dulu negara – negara komunis dianggap sebagai ancaman, maka kini yang dianggap sebagai ancaman adalah kelompok terorisme, hal ini karena mereka dianggap memiliki potensi untuk memiliki dan menguasai senjata pemusnah massal (*weapon of mass destruction*).

Ketiga, adalah meninjau kembali konsep kedaulatan (*a recasting of the term of sovereignty*). Dalam era sekarang prinsip *deterrence* yang dikembangkan pada masa perang dingin tidak lagi efektif. Teroris dianggap sangat licik dan kebal

terhadap ancaman dalam bentuk apapun, oleh karena itu Bush yakin untuk mengalahkan mereka maka perlu diadakan tindakan pencegahan di manapun tanpa mengenal waktu dan batas negara. Hal ini membuat pemerintah Bush merasa berhak untuk melakukan intervensi di negara manapun tanpa kecuali. Akibatnya kedaulatan negara – negara yang dianggap sebagai sarang teroris terancam hilang.

Keempat, pengabaian aturan – aturan dan perjanjian internasional (*a general of international rules, and security partnership*). Kekawatiran yang berlebihan terhadap ancaman teror membuat para pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan George W. Bush kehilangan kepercayaan terhadap aturan dan perjanjian internasional. Multilaterallisme mereka dianggap kurang efektif untuk membasmi ancaman teror dan mereka yakin kebijakan unilateral lebih efektif untuk memerangi terorisme.

Dengan strategi *neo imperialisme* ini maka akan menciptakan kekuasaan Amerika Serikat yang nyaris tak terbatas. Strategi ini memungkinkan Amerika Serikat untuk menentukan sendiri negara mana yang merupakan ancaman dan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk membasmi ancaman tersebut, hal ini merupakan ancaman terhadap prinsip – prinsip dasar kerjasama internasional.

2.3.1 Definisi Terorisme Internasional Dalam Perspektif Amerika Serikat.

Menurut Departemen Luar Negeri Amerika dalam publikasi tahunan 1987 mendefinisikan Terrorisme Internasional adalah :

“Terorisme adalah kekerasan fisik yang direncanakan dan bermotifasi politik yang dilancarkan terhadap sasaran – sasaran non kombatan oleh kelompok – kelompok sub nasional atau agen – agen rahasia negara, biasanya dimaksudkan untuk mempengaruhi publik tertentu”. (Hasnan A. Habib, 1997:572)

Terorisme terjadi bila sarana – sarana politik biasa sudah tidak berfungsi lagi, dengan kata lain terorisme adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain. Jadi dapat dikatakan bahwa terorisme adalah perang politik (political warfare)

Sedang menurut FBI, terorisme adalah tindakan kekerasan melawan hukum atau kejahatan melawan orang – orang atau perbuatan dengan mengintimidasi atau memaksa suatu pemerintahan, warga sipil dan unsur masyarakat lain dengan tujuan mencapai sasaran (target) sosial dan politik tertentu.

Sedangkan menurut CIA dalam laporan tahunan tentang “Pattern of International Terrorism” mendefinisikan Terorisme Internasional sebagai “*Terrorism conducted with the support of foreign nationals, institution, or government*”.

Sedang menurut Ali Khan, seorang pakar Terorisme internasional Washborn University School of Law AS, menyebutkan bahwa terorisme Internasional adalah suatu tindakan teroris yang melibatkan sejumlah aktor utama antara lain, *the aggrieved groups*, dan dua aktor lain *supporter state* dan *suppressive state*. Dalam hal ini Supporter states adalah negara – negara yang dianggap memberi dukungan moral, finansial, maupun militer terhadap para

terroris. Sedangkan *suppressive state* adalah negara – negara yang menentang dan berusaha menghukum dan menghentikan terorisme. (Kompas, 19 September 2001)

2.3.2 Peristiwa – Peristiwa Terorisme Yang Pernah Menyerang Amerika.

The Molly Maguires.

Molly Maguires adalah sebuah organisasi teroris yang mengancam daerah pertambangan batu bara di sebelah timur Pennsylvania pada tahun 1860- an dan tahun 1870 – an. Molly Maguires berasal dari Irlandia, yang kemudian membentuk suatu perkumpulan yang berposisi untuk menentang kesewenang – wenangan dari tuan tanah Inggris. Mereka didukung oleh massa dari Katolik Irlandia yang bermigrasi ke Amerika pada tahun 1840 – an. Molly Marguires membuat suatu misi perlawanan baru yang berbasis di tempat kerja industri batu bara yang ada di Amerika Serikat.

Aktivitas Molly Maguires di pertambangan batu bara tersebut merupakan respon yang muncul sebagai akibat dari adanya praktek perburuhan yang tidak adil dan diskriminasi etnis. Hal ini karena sebagian besar pekerja tambang adalah Katolik Irlandia, sedangkan para pimpinan pertambangan batu bara mereka adalah kaum protestan Scotlandia – Irlandia dan imigran dari Inggris.

Aksi terorisme yang dilakukan oleh Molly terjadi di Pennsylvania pada tahun 1865. Mereka melakukan lima kali pembunuhan, enam kali assault, dan dua puluh tujuh kali perampokan. Oleh karena aksinya tersebut, maka kemudian 20 anggota Molly ditangkap dan didakwa serta 10 diantaranya dihukum gantung dan

sisanya dihukum 2 sampai tujuh tahun. (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:546)

Black Panther

Black Panther didirikan oleh dua remaja kulit hitam yaitu Huey P. Newton and Bobby Seale, di Oakland California pada bulan Oktober 1966. Pada awalnya usaha mereka adalah untuk melindungi komunitas kulit hitam dari penganiayaan polisi, akan tetapi pada akhirnya mereka dengan sengaja melakukan tindakan agresif yang menjadikan organisasi mereka mengarah pada tindakan – tindakan yang profokatif dan konfrontatif. Pada puncaknya Partai Black Panther menjadi organisasi nasionalis kulit hitam yang besar pada akhir tahun 1960 – an. Menurut pendapat J. Edgar Hoover (Kepala FBI) Black Panther adalah merupakan ancaman terbesar terhadap masalah keamanan internal negara.

Tujuan umum dari Black Panther adalah kemapanan pendidikan, perumahan, keadilan bagi komunitas Afrika-Amerika. Akan tetapi secara tidak langsung mereka juga mempunyai tujuan untuk menuntut adanya persamaan hak kulit hitam pemunculan negara separatis kulit hitam. Untuk mencapai tujuan tersebut para anggota Black Panther berkeinginan untuk menggalang dukungan dari kelompok kulit putih yang berkuasa, seperti halnya komunis. Mereka juga membentuk aliansi dengan organisasi lain bahkan dengan organisasi pelajar radical Weatherman.

Walaupun tujuan akhir dari Black Panther adalah Revolusi politik akan tetapi mereka tidak memulai aksinya dengan aksi terorisme atau operasi gerilya. Mereka lebih suka tetap berada pada batas legalitas sampai tiba pada kondisi yang

tepat untuk melakukan revolusi. Sampai pada akhirnya Black Panther memiliki anggota kurang lebih 1500 – 2000 orang di lebih dari 60 kota pada 26 negara bagian. Akan tetapi metode yang mereka adopsi, retorika dan tindakan yang mereka lakukan semakin menyeret mereka untuk melakukan konfrontasi dengan aparat, sampai pada saat terjadinya kerusuhan massal yang terjadi pada tahun 1969, dimana pada saat itu polisi menangkap 749 orang anggota Black Panther dan membunuh sebanyak kurang lebih 27 orang. (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:548)

The Weatherman

The weatherman yang nantinya menjadi weather underground yang merupakan sebuah kelompok anarkhis yang memisahkan diri dari fraksi – fraksi pelajar sayap kiri pada akhir 1960 – an. Merekalah yang pertama kali mendeklarasikan tujuan mereka yaitu “kehancuran bagi imperialisme Amerika dan usaha untuk mengelompokkan kelas di dunia. Sepanjang tahun 1970 – an, weatherman telah melakukan pemboman dan serangan-serangan teroris lainnya, termasuk juga beberapa aksi terhadap institusi yang high profile yang menjadi target serangan mereka.

The weatherman membentuk kolektifitas group antara 5 – 25 anggota disejumlah kota yang semuanya di bawah kontrol biro cuaca Chicago Chicago Weather Bureau). Dalam kolektifitas tersebut para anggota menyerahkan hak miliknya, rekening bank, privasi, di segala hubungan monogami (semuanya untuk ikatan sentimentil).

Aksi sebagian anggota dari The Weatherman terjadi pada musim panas 1969, pada saat mereka mengadakan pengebolan penjara di sekolah, mengambil alih ruang – ruang kelas untuk menyampaikan pesan revolusi mereka kepada para murid dalam proses tersebut terkadang melibatkan baku hantam dengan polisi. Pada peringatan kematian Che Guevara yang kedua pada 8 Oktober 1969, 80 orang anggota Weatherman berbaris menuju Taman Lincoln (Lincoln Park) di Chicago. Dengan menggunakan helm hitam dan meneriakkan slogan – slogan, mereka berpidato di depan ratusan pemuda yang berkumpul. Kerumunan pemuda tersebut kemudian menyerbu jalan dan membuat keonaran. Namun pada akhirnya dapat diamankan oleh polisi dan diantara mereka banyak yang ditangkap.

Pada awal 1970 – an sekitar seratus anggota Weatherman bersembunyi untuk melarikan diri dari hukum dan memulai untuk berkampanye tentang kekerasan. Walaupun sangat sulit untuk melakukan sejumlah pengeboman, patut diketahui bahwa antara September 1969 dan Mei 1970, berbagai aksi radikal sering dilakukan (kurang lebih 250 pengeboman) terutama terhadap gedung – gedung pemerintahan. Namun setelah sekian lama menjadi buron akhirnya beberapa pendiri The Weatherman yang bertanggung jawab terhadap sejumlah aksi tersebut menyerahkan diri, antara lain Mark Rudd (1977), Bernadine Dohm dan William Ayers (1981), Jeffrey Powel (Januari 1994). (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:551)

Symbionese Liberation Army

Symbionese Liberation Army (SLA) didirikan oleh Donald de Freeze

di Berkeley pada akhir 1972 nama SLA berasal dari concept simbiosis, oleh karena itulah revolusi hanya akan terjadi dengan menghilangkan perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih dan adanya kerjasama antara pria dan wanita dalam hubungan simbiosis. SLA memandang masyarakat lebih dari sekedar kelas – kelas dan menginginkan adanya sebuah sistem yang terdiri dari negara – negara berdaulat dari bermacam – macam ras. Akan tetapi keinginan itu hanya didukung oleh Geurillia Family (pecahan dari Black Panther) yang mendukung keinginan itu.

Aksi pertama yang dilakukan oleh SLA dalam upaya mewujudkan cita – citanya tersebut adalah melakukan pembunuhan terhadap DR. Marcus Foster seorang Pengawas Sekolah (Superintendent) Afro – Amerika Serikat di Oakland pada tanggal 6 November 1973. SLA memilih dia karena keputusannya yang kontroversial yaitu mewajibkan bagi semua pelajar yang bersekolah di sekolah lokal kulit hitam untuk membawa kartu identitas demi keselamatan dirinya. Keputusan tersebut ditentang oleh sejumlah aktivis kulit hitam. SLA berpendapat bahwa isu tersebut dapat memberikan dampak global yang populer untuk membenarkan terjadinya tindak kekerasan terhadap kaum kulit hitam. Kenyataannya tindakan teror pembunuhan tersebut justru membawa kutukan keras dari seluruh kalangan kulit hitam termasuk pimpinan Black Panther, Huey P. Newton.

Aksi yang dilakukan selanjutnya adalah melakukan penculikan terhadap Patricia Hearst yang merupakan cucu dari William Randolph Hearst (seorang pengusaha surat kabar di USA) SLA memilih Patricia karena dia berasal dari

keluarga kaya dan merupakan target yang mudah. Tiga hari setelah penculikan, SLA memberikan rekaman berisikan ancaman untuk membunuh Patricia jika mencoba untuk melawan elemen - elemen yang ada dalam SLA. Pesan selanjutnya meminta adanya sistem distribusi makanan yang bebas terhadap kaum miskin yang semuanya didanai oleh Randolph Hearts (bapak Patricia).

Tetapi diluar dugaan, Patricia justru bergabung dengan SLA. Patricia akhirnya menghilang namun akhirnya dapat ditemukan kembali pada tanggal 18 September 1979. Patricia kemudian diajukan ke pengadilan dan oleh pengadilan, ia dinyatakan bersalah karena telah melakukan perampokan bersenjata dan kemudian dijatuhi hukuman 7 tahun penjara. (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:553)

Gerakan Separatis Puertorico.

Gelombang baru terorisme nasionalis meletus pada akhir tahun 1960 - an, yaitu dengan usaha pengeboman terhadap instalasi bisnis dan militer. Teror ini dilakukan oleh kelompok yang menamakan dirinya Armed Freedom Fighter yang dibekingi oleh Cuba. Pada tahun 1975, dua orang terbunuh dan sebelas orang luka - luka pada saat sebuah bom meledak di kota Mayaguez beberapa menit sebelum partai sosialis mengadakan rapat umum. Dua minggu kemudian terorisme menyebar ke daratan Amerika hal ini ditandai dengan meledaknya bom di kedai minuman Fraunce di New York. Yang mengakibatkan empat orang tewas dan empat puluh lima luka - luka.

Sebuah organisasi baru yang bernama Armed Forces for National Liberation (FALN) bertanggung jawab atas serangan tersebut. FALN didirikan

pada tahun 1974 oleh William Morales (orang Chicago keturunan Puerto Rico) dan Luis Rosado Ayala. Kelompok ini merupakan wujud dari kekecewaan banyak orang di Puerto Rico yang harus menerima kenyataan bahwa negaranya sejak tahun 1952 telah menjadi sebuah asosiasi negara merdeka di bawah Amerika Serikat (associated free state). Hal ini menimbulkan munculnya perjuangan pergerakan kemerdekaan bagi negaranya. Perjuangan ini diwujudkan dalam perlawanan sporadis dari kelompok minoritas dengan melakukan aksi terorisme yang gencar baik di wilayah negaranya sendiri ataupun di daratan Amerika dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Dalam melakukan aksinya, kelompok tersebut telah bertanggung jawab atas lebih dari seratus pengeboman, termasuk tigapuluh di New York dan lainnya di Chicago, San Francisco dan Washington DC. Serangan tersebut mengancam nyawa enam orang dan melukai beberapa orang serta mengakibatkan kerusakan yang diperkirakan sekitar 3,5 juta dollar.

Tahun 1979, Morales kehilangan sebuah matanya, satu tangannya dalam sebuah ledakan di pabrik bom FALN di Queens, New York. Morales akhirnya dipenjara namun akhirnya melarikan diri pada saat dirawat di rumah sakit. Sementara itu 11 anggota FALN lainnya didakwa atas pemboman di Chicago. (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:555)

Pengeboman terhadap gedung World Trade Center (1993)

Pada tanggal 26 Februari 1993, sebuah truk bermuatan 1200 pon dinamit meledak di sebuah tempat parkir bawah tanah di WTC New York. Ledakan yang

memiliki radius 200 kaki tersebut menewaskan 6 orang dan melukai lebih dari seribu orang.

Dua jam setelah ledakan, ada seseorang yang bernama Mohammed Salameh memasukkan sebuah truk ke kantor persewaan di New Jersey. Dia mengklaim bahwa truk yang ia sewa telah dicuri dan meminta kerugian sebesar 400 \$. Akan tetapi FBI kemudian justru menangkap Salameh, hal ini karena bukti yang ditemukan oleh FBI berupa nomer seri dari van yang digunakan dalam aksi pemboman tersebut merupakan nomer seri van yang telah ia sewa.

Selanjutnya, FBI melakukan pengembangan penyelidikan dan berhasil membongkar jaringan Fundamentalisme Islam yang berhubungan dengan jaringan teroris yang dipimpin oleh Sheikh Omar Abdel Rahman. Dia adalah seorang pemimpin spiritual kelompok Islam (Al - Gamaa al Islamiyyah/ Jamaah Islamiyah) yang merupakan pecahan dari kelompok pergerakan *extrem al - Jihad* di Mesir tahun 1981. Abdel Rahman pernah terlibat dalam pembunuhan Presiden Mesir Anwar Sadat namun pada akhirnya dibebaskan. Abdel Rahman kemudian hijrah ke USA pada tahun 1990 dan menetap di New Jersey, dia kemudian terus menyebarkan pengaruh Anti Barat.

Pengeboman Gedung Federal Alfred P. Murrah Oklahoma

Pengeboman terhadap Gedung Federal Alfred P. Murrah, Oklahoma City, terjadi pada tanggal 19 April 1995. Pengeboman tersebut telah menewaskan 169 orang dan melukai lebih dari 500 orang (banyak diantaranya anak kecil) Peledakan ini merupakan peledakan yang mematikan yang pernah terjadi di USA sebelum tragedi 11 September 2001. Pelaku pemboman tersebut adalah Timothy

Mc Veigh, seorang warga negara Amerika Serikat yang dibantu oleh Michael Fortier (dalam merakit bom). Dia juga dituduh telah membawa senjata yang dicuri, berbohong kepada FBI, serta lalai memberi peringatan kepada pemerintah tentang rencana teror pengeboman.

Mc. Veigh adalah seorang yang pernah bergabung dalam operasi badai gurun dan mengantongi bintang perunggu. Akan tetapi Mc Veigh merasa disakiti oleh pemerintah Federal di Waco Texas. Dia yakin bahwa ini hanyalah merupakan salah satu contoh ikut campurnya pemerintah yang terlalu jauh terhadap kehidupan warganya. Dia tampaknya juga memiliki jaringan dengan milisi Michigan (sebuah organisasi yang telah kehilangan ikatan dengan milisi (wamil) lain di USA) Milisi ini dikategorikan sebagai milisi garis keras sayap kanan. (International Encyclopedia of Terrorism,1999:557)

Pengeboman terhadap gedung World Trade Center (2001)

Serangan terorisme yang dilakukan pada tanggal 11 September 2001, merupakan serangan terorisme paling dahsyat yang pernah dilancarkan oleh organisasi teroris internasional terhadap Amerika Serikat. Serangan tersebut dikenal dengan "Black September" yang kemudian ditetapkan sebagai tragedi nasional. Serangan yang mengerikan tersebut telah menghancurkan dua menara raksasa World Trade Center di New York yang merupakan simbol dari hegemoni Amerika Serikat di bidang ekonomi serta Pentagon yang merupakan simbol dari kekuatan Amerika Serikat di bidang militer dan pertahanan. Selain itu serangan tersebut juga menimbulkan kepanikan nasional yang luar biasa bagi warga

Amerika. Sehingga mengakibatkan lumpuhnya kegiatan warga serta menimbulkan ketegangan serta kengerian.

Aksi terorisme tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 September 2001 jam 8.45 pagi, dimulai dengan ditabraknya Tower sebelah Utara gedung WTC New York oleh sebuah pesawat Boeing 757 dari American Airlines dengan nomer penerbangan 11, yang membawa penumpang berjumlah 93 orang. Pesawat tersebut berangkat dari bandar udara Logan, Boston menuju Bandara Internasional Los Angeles. Pesawat tersebut kemudian dibajak, dan oleh para pembajak diarahkan ke New York dan kemudan ditabrakkan ke tower selatan WTC. Tabrakan hebat tersebut mengakibatkan kebakaran serta ledakan yang hebat di gedung tersebut. Serangan pertama ini menimbulkan ketakutan dan kepanikan yang luar biasa.

Selang setengah jam kemudian, sebuah pesawat Boeing 757 dari maskapai penerbangan American Airlines yang juga telah dibajak, dan tinggal landas dari bandar udara Logan, Boston yang berpenumpang 62 orang kembali ditabrakkan ke tower sebelah Selatan WTC. Hal ini kemudian mengakibatkan kebakaran hebat serta mengakibatkan banyak sekali korban jiwa. Sekitar 400 pemadam kebakaran dikerahkan untuk menanggulangi kebakaran tersebut. Setelah itu menara bagian selatan yang tingginya 1353 kaki itu meledak dan hancur.

Akibat serangan tersebut, maka seluruh penerbangan dari dan ke New York ditutup. Juga semua terowongan dan jembatan dari dan New York seta New Jersey juga dinyatakan ditutup untuk waktu yang tidak dapat ditentukan. Selain itu otoritas penerbangan di Amerika Serikat kemudian juga mengambil keputusan

untuk menutup seluruh akses penerbangan dari dan ke Amerika Serikat, hal ini baru pertama kali terjadi dalam sejarah penerbangan negara tersebut.

Pada hari itu juga jam 9.45 telah terjadi serangan terhadap Gedung pusat pertahanan Amerika Serikat Pentagon. Serangan tersebut juga dilakukan dengan menabrakkan pesawat Boeing 767 American Airlines yang berangkat dari bandar udara Dules Virginia, menuju bandar udara Los Angeles dengan membawa 64 penumpang. Serangan terhadap Pentagon tersebut makin membuat panik seluruh bangsa Amerika kejadian tersebut membuat Presiden beserta seluruh staf gedung putih harus dievakuasi.

Selanjutnya sekitar jam 10.10 pagi, sebuah pesawat dari maskapai penerbangan United Airlines dengan nomer penerbangan 93 jatuh di Srinj Creek, 80 mil dari Pittsbugh dan menewaskan 64 penumpangnya. Pesawat ini terbang dari bandar udara Newark, New Jersey menuju bandara Internasional San Fransisco. Setelah kejadian itu Federal Aviation Administration (FAA) mengalihkan semua penerbangan yang menuju Amerika Serikat ke Canada, sehingga udara Amerika Serikat menjadi zona larangan terbang.

Jam 10.25 WTC tower sebelah utara yang memiliki ketinggian 110 lantai akhirnya runtuh rata dengan tanah. Tragedi tersebut telah menimbulkan banyak sekali korban jiwa, diperkirakan sekitar 4000 orang meninggal dunia. Sore hari setelah kejadian itu FBI mengumumkan bahwa keempat pesawat yang dibajak dan ditabrakkan tersebut adalah merupakan bagian dari serangan terorisme internasional. Pada hari Kamis tanggal 13 September 2001 Menteri Luar Negeri

Amerika Serikat Colin Powell memastikan bahwa Osama bin Laden dijadikan tersangka aksi terorisme tersebut. (www.washington.com)

2.3.3 Usaha Amerika Serikat Dalam Memerangi Terorisme Internasional

Di abad ini Amerika Serikat selalu terlibat dalam aktivitas untuk memerangi terorisme dengan berbagai cara dan taktik, seperti dengan cara diplomasi, pengerahan tenaga intelejen, serta penggunaan kekuatan militer untuk menjaga keamanan, baik dalam negeri ataupun fasilitas – fasilitas mereka yang ada di luar negeri. Amerika Serikat menganggap bahwa ancaman terorisme sebagai sesuatu yang sangat berbahaya, keseriusannya dalam memerangi terorisme diakibatkan juga oleh adanya kenyataan bahwa saat ini terjadi peningkatan serangan terorisme baik dari segi kualitas ataupun kuantitas terhadap kepentingan – kepentingan negara tersebut.

Adanya peningkatan serangan terorisme internasional tersebut, maka diperlukan usaha yang komprehensif dalam menangani permasalahan ini. Sebelum terjadi serangan 11 September 2001, Amerika Serikat melihat fenomena terorisme dalam kerangka pendekatan politis, hal ini karena sulitnya menentukan parameter yang jelas tentang terorisme itu sendiri, memutuskan siapa yang teroris atau bukan, serta bagaimana merespon tindakan terorisme tersebut. Oleh karena itu terkadang respon yang dilakukan Amerika Serikat justru bertolak belakang dengan kenyataan yang ada (standar ganda), hal ini bisa kita lihat dari pengeluaran daftar negara – negara yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai pendukung terorisme yang meliputi Libya, Korea Utara, Irak, Iran, Kuba, Sudan, dan Syiria meskipun Amerika Serikat belum punya bukti yang cukup kuat

akanketerlibatan mereka. Akan tetapi sebaliknya, Serbia yang pada awal tahun 1990, dengan terang – terangan mendukung gerakan terorisme terhadap kaum muslim Bosnia tidak dimasukkan dalam daftar tersebut.

Tindakan terorisme, baik yang dilakukan oleh negara ataupun oleh organisasi dan individu adalah suatu tindak kriminal. Di dalam negeri Amerika Serikat, Departemen Kehakiman dan FBI bertanggung jawab atas pengamanan dari serangan terorisme. Salah satu cara yang diterapkan adalah dengan menjalin kerjasama dengan agen – agen penegak hukum dari negara, terutama berkaitan dengan masalah intelejen dan investigasi. Hal ini dilakukan juga oleh Biro Keamanan Diplomatik (Diplomatic Security) yang dibentuk pada tahun 1986 oleh Depdagri. Diplomatic Security bekerja sama dengan perusahaan pribadi di Amerika Serikat dan organisasi non pemerintah dari negara lain melalui Konsul keamanan dan penasehat lintas negara. Dari kerjasama ini Diplomatic Security banyak mendapat akses informasi tentang jaringan terorisme. (International Encyclopedia of Terrorism, 1999:644)

Selain itu institusi penegak hukum Amerika Serikat juga harus dapat mengantisipasi perkembangan terorisme yang semakin meningkat. Sebagai contoh dulu FBI tidak pernah berbagi tugas dengan agen keamanan yang lain, akan tetapi dalam perkembangannya FBI dapat bekerjasama dengan Kepolisian daerah sebagaimana yang terjadi dalam pengamanan Olimpiade Los Angeles yang dilakukan oleh Kepolisian Los Angeles dan FBI. Selain di dalam negeri, upaya dalam mengatasi masalah terorisme, juga membutuhkan kerjasama internasional yang terpadu dan komprehensif. Salah satu metode kerjasama dalam mengatasi

terorisme yang paling efektif adalah bentuk persetujuan bilateral dari negara – negara yang bertetangga. Hal ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Kuba pada tahun 1973, dimana keduanya sepakat untuk saling mengembalikan pesawat, penumpang dan pembajak. Dalam hal ini ekstradisi dapat diterapkan akan tetapi seringkali lebih memilih deportasi sebagai salah satu bentuk ekstradisi. Selain kerja sama bilateral Amerika Serikat juga mengajak dunia internasional, melalui PBB untuk lebih meningkatkan usaha dalam memerangi terorisme.

Tetapi setelah terjadi serangan 11 September 2001, terjadi perubahan yang sangat drastis terhadap kebijakan politik dan keamanan yang diambil oleh pemerintah Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Hal ini karena serangan teroris tersebut telah menimbulkan luka yang mendalam bagi rakyat Amerika, selain itu serangan tersebut seolah - olah telah meruntuhkan mitos Amerika Serikat sebagai negara super power. Hal ini tentu saja merendahkan harkat dan martabat bangsa Amerika. Serangan tersebut telah ditetapkan sebagai tragedi nasional serta telah memicu kemarahan dan dendam bagi rakyat Amerika. Hal ini tercermin dalam pidato George W. Bush didepan Konggres Amerika pada hari Rabu tanggal 20 September 2001. Dengan kemarahan yang luar biasa Bush mendesak dunia untuk mendukung tindakannya dalam memerangi terorisme sebagai mana pernyataannya “Anda bersama kami, atau bersama terorisme”, hal ini dapat diartikan bahwa dalam memerangi terorisme tidak ada “grey area”. Apabila sebuah negara tidak mendukung Amerika maka dia akan dianggap sebagai negara yang mendukung terorisme. Selain itu George W. Bush juga mengeluarkan pernyataan bahwa “ Setiap pihak yang merencanakan, melakukan,

membentuk aksi – aksi teroris di Amerika Serikat dan kepentingannya akan dilawan oleh pihak keamanan, karena penting bagi Amerika Serikat untuk mempertahankan diri dan melindungi seluruh warga negaranya baik yang berada di dalam ataupun di luar negeri”.

Tindakan George W. Bush yang mencanangkan perang terhadap terorisme internasional didasarkan pada tindakan *pre – emptive strike* yaitu situasi dimana suatu negara dapat menggunakan hak bela dirinya (*right of self defence*), hak membela diri umumnya dilakukan pada saat negara mendapat serangan, sampai serangan itu terjadi. Dalam *pre- emptive strike*, pihak yang merasa terancam dapat melakukan serangan terlebih dahulu terhadap pihak yang (dianggapnya) mengancam, sebagaimana yang ada pada pasal 51 Piagam PBB. Tindakan George W. Bush tersebut didukung oleh Konggres dan Senat Amerika yang memberikan alokasi dana sebesar 40 miliar dollar AS, sebagai paket darurat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan militer dalam memerangi terorisme. Selain itu pada tanggal 18 Setember 2001 ia juga menandatangani resolusi Konggres yang memberinya wewenang penuh kepada militer Amerika Serikat untuk mengambil tindakan terhadap setiap pihak yang berada di balik serangan 11 September 2001.

Untuk lebih memuluskan rencana serangan balasan terhadap teroris, maka George W. Bush juga meminta bantuan dunia internasional, antara lain dari negara – negara sekutunya serta NATO. Permintaan bantuan tersebut direspon oleh NATO dengan memberi bantuan armada 5 pesawat radar AWACS 18E-3A milik NATO dari pangkalannya di Jerman ke Amerika Serikat. Hal ini didasari oleh adanya solidaritas NATO, ke 19 anggota NATO pada tanggal 12 September

2001 sepakat untuk mendukung setiap reaksi Amerika Serikat terhadap serangan terorisme. Berdasarkan ketentuan dalam pasal V Pakta Washington, yang menetapkan bahwa serangan bersenjata terhadap setiap sekutu di Eropa dan Amerika Utara mesti dianggap sebagai serangan terhadap semua.

Perang terhadap terorisme internasional yang dicanangkan oleh Amerika Serikat juga mendapat dukungan dari PBB, seperti yang terungkap dalam pidato Sekretaris Jendral PBB pada sidang tahunan ke - 56 Majelis Umum PBB, yang menyerukan kepada seluruh anggota PBB untuk bergabung dalam koalisi global guna melawan terorisme. Dia mengatakan bahwa "Terorisme akan dikalahkan jika masyarakat internasional menyatukan niat untuk bergabung di dalam koalisi luas, atau terorisme itu tidak akan pernah dikalahkan.

Selain itu dukungan PBB dapat dilihat ketika Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengirim pesan kepada pemerintah Taliban di Afghanistan untuk menyerahkan tersangka utama pengeboman WTC Osama bin Laden. Hal ini diancam dengan Resolusi DK PBB No. 1333 yang isinya semua negara harus memboikot Taliban serta membekukan aset dan rekening serta membekukan kegiatan mereka, selain itu semua pemimpin dan pejabat Taliban dimasukkan dalam daftar orang yang harus di buru.

2.4 Hubungan Politik Luar Negeri Indonesia Amerika Indonesia Sebelum 11 September 2001

Hubungan luar negeri antar Indonesia dan Amerika Serikat selalu mengalami pasang surut, tergantung pada isu – isu utama yang membentuk pola hubungan antara keduanya. Seperti yang dikemukakan oleh Paul Kennedy bahwa

hubungan Indonesia Amerika ini *sometimes close sometimes quarrelsome*. Sebelum terjadinya serangan 11 September 2001, sebenarnya hubungan politik luar negeri Amerika Serikat dan Indonesia mengalami berbagai macam tekanan, hal ini diakibatkan mulai bergesernya isu – isu yang dikembangkan dalam pola hubungan politik luar negeri. Pada masa ini politik luar negeri Clinton lebih terfokus pada masalah masalah isu tentang hak – hak asasi manusia, serta menempatkan kebijakan ekonomi sebagai landasan utama. Seperti yang pernah diungkapkan Clinton dalam salah satu pernyataannya, " *if you don't rebuild the economic strenght of this country at home, we won't be super power*". Sedangkan strategi dalam kebijakan hak asasi manusia bertumpu pada empat komponen yaitu pertama, memperkuat negara demokrasi pasar bebas, kedua, membantu konsolidasi demokrasi – demokrasi baru, ketiga melawan gerakan anti demokrasi dan mendukung gerakan pro – demokrasi, keempat membantu menumbuhkan ekonomi pasar dikawasan miskin.

Munculnya isu – isu demokrasi tersebut juga tidak lepas dari peranan aktifis hak asasi manusia seperti *Ammesty Internasional* dan *Human Right Watch*, politisi Partai demokrat, dan mediamassa yang secara tidak langsung membentuk opini publik bahwa hak asasi manusia adalah isu penting. Hal inilah yang banyak mempengaruhi kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia. Perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia yang terjadi pada masa itu antara lain dalam masalah :

1. Pada masalah penetapan resolusi HAM PBB

Pada masa ini Clinton memberi tekanan yang keras terhadap Indonesia pada masalah pelanggaran HAM yang terjadi di Timor Timur. Hal ini seperti terlihat dalam Sidang komisi Hak Asasi Manusia PBB di Jeneva Swiss pada Maret 1993, untuk pertama kalinya sejak 1975, delegasi Amerika Serikat menyatakan keprihatinan yang mendalam terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur, terjadinya pergeseran dalam kebijakan politik luar negeri Amerika ditunjukkan oleh Komisi HAM PBB dengan diterimanya resolusi yang menyatakan "keprihatinan yang mendalam" terhadap pelanggaran HAM di Timor Timur untuk pertama kalinya sejak Indonesia menganeksasi bekas koloni Portugis pada 1975.

Resolusi ini didukung oleh 22 negara, 12 negara menolak, dan 15 abstain. Pergeseran ini sangat mengejutkan, perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia ini sebenarnya merupakan konsekwensi dari dukungan Clinton terhadap meningkatnya tuntutan para aktivis hak asasi manusia dan buruh sejak berakhirnya perang dingin (DR. Bambang Cipto, MA, 2003:286) Meluasnya oposisi terhadap Indonesia dikalangan Kongres tampaknya merupakan kondisi objective dalam negeri yang membuat Clinton tidak mungkin mengingkari janji pemilunya, oleh sebab itu Clinton mengubah kebijakan hak asasi manusia terhadap Indonesia, yang semula lunak menjadi kritis.

2. Peninjauan Manfaat General System Preference (GSP) untuk Indonesia.

Memburuknya hubungan luar negeri Indonesia dan Amerika semakin diperparah dengan kondisi perburuhan yang terjadi di Indonesia yang mengundang protes dari kalangan aktivis HAM, seperti terjadinya pembunuhan terhadap aktivis buruh Marsinah. Hal ini membuat Human Right Group dan The International Labor Right Education and Research Fund mendesak Clinton dalam hal ini USTR, agar mencabut manfaat GSP yang diperoleh Indonesia. Hal ini direspon Clinton dengan menempatkan Indonesia dalam witing list, hal ini dapat membuat Indonesia kehilangan manfaat dari GSP (Generalized System Preference). Seperti yang dimuat dalam majalah Asian Security :

" in June 1993, the US Trade Representatif, Mickey Cantor alleged that the Indonesian government was not adequately protecting the right of workers and warned that special threatment of Indonesian export under the generalized system of preference was jeopardy. (Asian Security, 1994-1995:163)

Penundaan ini dianggap penting karena dengan adanya hal tersebut diharapkan agar pemerintah Indonesia segera memperbaiki kondisi hak asasi manusia dan perburuhan di Indonesia.

3. Penolakan Transfer Pesawat F-5E eks Yordania.

Pada awal Agustus 1993, Clinton kembali melancarkan tekanan diplomatik terhadap Indonesia, sehubungan dengan rencana pembelian pesawat F-5E bekas, yang akan dijual Yordania kepada Indonesia. Melalui Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Clinton melarang pembelian pesawat tersebut dengan alasan buruknya catatan hak asasi manusia di Timor Timur. Dengan

adanya pelarangan tersebut dapat diartikan bahwa sebagai awal dari embargo senjata terhadap Indonesia. (DR. Bambang Cipto, MA, 2003:291)

4. Revisi Program Bantuan Pendidikan dan Pelatihan Militer (IMET)

Pada Pebruari 1995 Clinton mengusulkan untuk memberikan kembali bantuan militer kepada Indonesia dalam bentuk International Military and Training (IMET) yang telah dibekukan Bush karena peristiwa Dili 12 November 1991. Jika usulan tersebut diterima maka Konggres akan memutuskan hal tersebut sebelum Oktober 1995. Selain itu Clinton juga menyatakan bahwa akan tetap memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan negara – negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, yang kemakmuran ekonominya cukup menggembirakan. Berkat sukses APEC akhirnya Konggres memutuskan untuk memberikan kembali program bantuan militer kepada Indonesia, namun hanya dalam bentuk Extended IMET. Program ini lebih banyak memberikan pelatihan tentang hak asasi manusia bagi para perwira dan hanya merupakan sebagian dari keseluruhan program IMET yang tidak lagi diberikan sejak peristiwa Dili. (DR. Bambang Cipto, MA, 2003:300)

5. Penundaan Rencana Penjualan pesawat F- 16

Keberhasilan Clinton dalam membujuk Konggres agar mengesahkan program IMET (walaupun terbatas) merupakan alasan untuk mencari terobosan dalam meningkatkan hubungan kedua negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya tawaran Amerika untuk menjual 9 pesawat F- 16 yang semula akan dijual ke Pakistan. Namun dengan terjadinya penyerbuan, terhadap kantor DPP PDI di Jakarta, pada 27 Juli 1996, mengakibatkan hubungan Indonesia – Amerika Serikat

kembali tegang. Kejadian politik domestik ini, diluar dugaan pemerintah Indonesia mengundang reaksi keras dari pemerintahan Clinton yang mendesak pemerintah Indonesia agar memberi akses bagi organisasi hak asasi manusia independen untuk mengunjungi orang yang ditangkap serta mengumumkan jumlah yang hilang. Kekerasan politik yang melibatkan aparat keamanan pada kasus 27 Juli dianggap sebagai penghalang proses penjualan 9 pesawat F16 tersebut, khususnya di kalangan Konggres. Konggres menentang rencana penjualan pesawat tersebut karena alasan hak asasi manusia di Indonesia pada umumnya dan Timor Timur pada khususnya. (Hearing before the Subcommittee Asia and the Pacific of the committee on International Relation HOR, 105th Congress, 1st Session, 7, 1997) Penolakan Konggres tersebut mendorong Suharto untuk lebih dahulu membatalkan rencana pembelian pesawat tersebut sebelum Konggres mengambil keputusan resmi. Tindakan preemtive yang diambil Suharto ini menguntungkan baik bagi Suharto maupun Clinton. Pembatalan tersebut mengurangi beban Clinton yang tengah dilanda berbagai dugaan skandal, dan membuka peluang untuk tetap menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat di bidang lain.



BAB III

3.1 Faktor – faktor yang mempengaruhi perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia.

Setiap negara selalu memiliki hubungan dengan negara lain dalam melakukan aktivitas internasionalnya. Segala aktifitas dan keterlibatan suatu negara dengan negara lain dalam tata pergaulan internasional, menuntut pemerintah masing – masing negara untuk memikirkan bagaimana tindakan dan sikap mereka terhadap negara lain agar sesuai dengan kepentingan mereka. Segala bentuk sikap, tindakan maupun kebijaksanaan yang mereka ambil dalam berhubungan dengan negara lain disebut dengan politik luar negeri. Sebagaimana yang diungkapkan oleh K.J Holsti bahwa: Kebijakan, sikap atau tindakan negara merupakan output politik luar negeri, output tersebut merupakan tindakan atau pemikiran yang disusun oleh para pembuat keputusan untuk mengusahakan perubahan dalam lingkungan internasional (K.J Holsti, 1987:131) Politik luar negeri merupakan sikap dan komitmen dari suatu negara terhadap kondisi lingkungan eksternal dan internalnya, yang merupakan strategi dasar untuk mencapai kepentingan nasionalnya yang harus dicapai diluar batas wilayahnya.

Menurut jenisnya kebijakan politik luar negeri dibedakan menjadi tiga. Pertama, kebijakan politik luar negeri yang bersifat umum, yang merupakan rangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan – pernyataan kebijakan dan tindakan langsung. Pernyataan kebijakan dan tindakan langsung tersebut saling mendukung satu sama lain dan membentuk suatu hierarki kebijakan yang relatif konsisten. Akan tetapi kadang - kadang kebijakan politik

luar negeri tidak mengungkapkan sifat yang sebenarnya, tetapi merupakan suatu cara yang sering digunakan dalam interaksi antar negara. Kedua, kebijakan politik luar negeri yang bersifat administratif, yaitu kebijakan politik luar negeri yang dibuat oleh anggota birokrasi, pemerintahan yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Kebijakan politik luar negeri yang bersifat administratif biasanya dibatasi oleh ruang, lingkup dan waktu yaitu diambil dalam hubungannya dengan negara tertentu dalam masalah tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, kebijakan politik luar negeri yang bersifat krisis, merupakan kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh suatu negara yang biasanya menyangkut kondisi - kondisi khusus (adanya kesan mendadak, terancam, terbatas oleh waktu dan mendesak) yang membawa konsekuensi konsekuensi jangka panjang yang melibatkan pejabat tinggi dan rendah serta berdampak pada kebijakan politik luar negeri secara umum. (William D. Coplin, 1992:32) Ketiga macam kebijakan politik luar negeri tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya.

Kebijakan politik luar negeri tersebut di implementasikan dalam sejumlah keputusan yang tersusun dalam kebijakan politik suatu bangsa, dimana para aktor pengambil keputusan luar negeri akan selalu mempertimbangkan berbagai faktor, baik faktor eksternal (posisi suatu negara dalam hubungannya dengan negara lain dalam sistem internasional) maupun faktor internal (kondisi politik dalam negeri, kemampuan ekonomi dan militer) yang berpengaruh terhadap formulasi kebijakan politik luar negerinya.

Dalam teori proses pembuatan politik luar negeri (The Decision Making Proses) menjelaskan bahwa politik luar negeri dipandang sebagai hasil berbagai pertimbangan rasional yang berusaha menetapkan pilihan atas berbagai alternatif yang ada, dengan keuntungan yang sebesar – besarnya ataupun dengan kerugian yang sekecil – kecilnya (optimalisasi hasil). Para pembuat keputusan juga diasumsikan bisa memperoleh informasi yang cukup sehingga bisa dipakai sebagai pertimbangan dalam pengambilan politik luar negeri untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan.

Menurut Graham T. Allison, Decision Making Proses model ke III dengan pendekatan Politik Birokratik, mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan politik luar negeri dilakukan oleh berbagai aktor yang berperan sebagai pemain. Hubungan antar aktor tersebut tersebut secara umum digambarkan sebagai suatu proses tarik menarik antara satu sama lain (*pulling and hauling*). Oleh karena itu kebijakan politik luar negeri dipahami sebagai *political out comes*. Dimana *political out comes* tersebut bukanlah penyelesaian yang dipilih oleh masing – masing aktor politik, akan tetapi merupakan hasil kompromi, koalisi dan kompetisi antar aktor. Tercapainya suatu *political out comes* bersifat politis, dalam arti bahwa kegiatan tersebut berlangsung dalam situasi tawar menawar antar aktor. Kemampuan dan keahlian aktor itulah yang menentukan hasil akhir dari proses pengambilan keputusan dalam konteks birokratik politik (James E. Dougherty and Robert L. Pfaltzgraft, Jr. 1990:477)

Dalam kerangka pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersumber dari konstitusi, memberikan wewenang penuh kepada Presiden

yang dibantu oleh anggota kabinetnya khususnya Secretary of State (Menteri Luar Negeri). Meski demikian, secara konstitusional Kongres, memiliki peran yang menentukan pula dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri. Konstitusi Amerika Serikat menyatakan bahwa *House of Representatif* memiliki wewenang untuk *to regulate commerce with foreign nation*, dan bahwa setiap traktat yang dibuat harus mendapat persetujuan Senat untuk di ratifikasi. (www.usinfo.com) Oleh karena itu ada banyak aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri dan memiliki peran yang berlainan. Aktor – aktor seperti Senator, Representatif (Kongresman), Presiden (yang dijabat oleh para pejabat dari agency/departemen/ kantor pemerintah) memainkan peran yang lebih besar dibandingkan dengan kelompok kepentingan dan media massa. Senator, Representatif (Kongresman), pejabat departemen memainkan peran yang besar, khususnya dalam proses perundingan / bargaining. Mereka memiliki otoritas yang tidak dimiliki oleh kelompok kepentingan dan media massa. Seorang Senator adalah pembuat undang undang yang bersifat mengikat (legislator), sedangkan pejabat departemen adalah eksekutif yang memiliki otoritas resmi untuk menjalankan kebijakan publik. Kedua kelompok ini dapat melakukan tawar menawar dan kompromi bila proses pembuatan kebijakan mengalami jalan buntu. Sementara itu kelompok kepentingan lebih banyak memanfaatkan tekanan (*pressure*) dalam keikutsertaan mereka pada proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Kelompok ini biasanya menekan Senator, Kongresman baik lewat negara bagian, distrik, media massa, atau membantu mengusulkan pembuatan undang – undang. Mereka tidak bisa terlibat langsung dalam proses tawar

manawar (*bargaining*) dan kompromi dengan para legislator. Namun mereka dapat hadir dalam proses dengar pendapat dan memberikan masukan berupa usulan atau ataupun pernyataan tentang sebuah rancangan kebijakan ataupun dapat langsung berhubungan dengan para pejabat eksekutif untuk memberikan masukan, kritik, saran ataupun petisi, oleh karena itu tekanan – tekanan publik yang berasal dari mereka menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri.

Sebagai wakil rakyat, setiap anggota Kongres memiliki posisi tawar yang tinggi, mereka dapat menentukan apakah proses legislasi dari sebuah rancangan kebijakan dapat dilanjutkan atau tidak. Oleh karena itu eksekutif dan kelompok kepentingan akan mengirim para pelobby untuk menggagalkan atau mengakselerasi proses legislasi sebuah rancangan kebijakan. Presiden yang memiliki legitimasi yang kuat akan lebih mudah untuk mendapatkan dukungan Kongres dalam menentukan kebijakan luar negeri. Sebaliknya jika Presiden kurang mendapat legitimasi maka ia akan kesulitan mendapat dukungan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Oleh karena itu baik Presiden ataupun Kongres dapat melakukan tawar menawar (*bargaining*) untuk mencapai kompromi atau konsensus. Hasil dari sebuah proses bargaining tersebut tentu bukanlah suatu yang ideal dan memuaskan semua pihak sebab merupakan hasil dari proses tarik menarik kepentingan dari tiap – tiap kelompok. Oleh karena itu perimbangan posisi tawar eksekutif dan legislatif akan sangat menentukan hasil akhir dari sebuah proses politik apakah kompromi, penolakan kompromi ataupun konsensus.

Perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dibawah pemerintahan George W. Bush pada dasarnya merupakan cerminan dari kepentingan *'national interest'* Amerika Serikat di Indonesia. Kepentingan utama Amerika Serikat di Indonesia pasca tragedi 11 September 2001 adalah kepentingan ekonomi dan kerjasama pertahanan dalam memberantas terorisme internasional. Pada masa pemerintahan Clinton, kepentingan Amerika Serikat di Indonesia lebih banyak pada masalah - masalah yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi, geopolitik, serta dititik beratkan pada masalah hak asasi manusia yang kemudian berkembang menjadi perhatian utama dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini mengakibatkan kebijakan politik luar negeri yang diambil oleh pemerintah Clinton lebih banyak menekan Indonesia seiring dengan terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia di berbagai wilayah di Indonesia seperti Timor Timur, Aceh dan Papua. Berbeda dengan Clinton, George W. Bush lebih pragmatis dalam menjalankan kebijakan politik luar negerinya hal ini diterapkan untuk menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat. Oleh karena itu kebijakan politik luar negeri yang dijalankan, utamanya oleh Departemen Luar Negeri dibawah kepemimpinan Menlu Colin Powel membawa misi utama yaitu *to bring Americas diplomacy into the 21 Century*. Kebijakan politik luar negeri yang diambil memiliki prinsip bahwa Amerika Serikat seharusnya melakukan intervensi secara selektif. Intervensi dilakukan jika kepentingan Amerika Serikat terlibat didalamnya, dan mendapat dukungan dari Kongres dan rakyat Amerika Serikat.

Kepentingan Amerika Serikat di Indonesia di bidang ekonomi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi pasar sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar tempat memasarkan hasil -- hasil industri Amerika Serikat yang saat ini sedang mengalami kelesuan pasar domestik yang diakibatkan oleh pengaruh stagnasi pasar internasional yang dipicu oleh serangan teroris yang telah menghancurkan WTC (New York) yang merupakan pusat perekonomian dan perdagangan Amerika Serikat serta terjadinya berbagai skandal keuangan yang menimpa perusahaan multinasional. Untuk menggairahkan kegiatan ekonomi dan memacu pertumbuhan ekonomi maka Amerika Serikat melakukan hubungan perdagangan yang lebih aktif dengan Indonesia, baik lewat pemberian bantuan luar negeri untuk pembangunan ataupun melakukan investasi serta meningkatkan volume import atau eksport dari dan ke Amerika Serikat.

Selain sebagai pasar yang potensial di kawasan Asia Tenggara, Indonesia merupakan salah satu pemasok utama kebutuhan minyak dan gas bumi yang sangat diperlukan oleh industri -- industri di Amerika Serikat. Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen minyak bumi terkemuka di dunia, sehingga mampu memenuhi 23% kebutuhan minyak Jepang serta sekitar 6% kebutuhan minyak bumi Amerika Serikat. Indonesia juga merupakan produsen gas alam terbesar di dunia, dimana sekitar 60 % perusahaan asing dalam industri minyak di Indonesia berasal dari Amerika Serikat (John W. Garver dalam James C. Hsiung, 183:86). Investasi perusahaan Amerika Serikat dalam industri minyak dan gas alam tampaknya akan semakin besar, hal ini karena cadangan gas alam raksasa di pulau Natuna sedang dalam proses pengembangan antara pemerintah Indonesia dan

Exxon Corporation dengan perkiraan biaya sekitar US\$17 milyar. Besarnya kandungan gas dan minyak bumi inilah yang mengakibatkan Indonesia menjadi negara yang penting bagi perekonomian Amerika Serikat. (John W. Garver dalam James C. Hsiung, 1983:89)

Posisi Indonesia yang terletak di persimpangan jalan laut antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang menyebabkan Indonesia menjadi bagian penting bagi kepentingan strategis Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik. Amerika Serikat juga berkepentingan untuk melindungi jalur minyak dari timur tengah ke Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik, karena dua pertiga kebutuhan minyak Jepang diangkut lewat selat Malaka dan perairan Indonesia. Selain itu kawasan ini juga merupakan pangkalan angkatan laut dan udara yang diperlukan Amerika Serikat untuk melindungi kepentingannya di kawasan itu. Mereka juga memerlukan jalur tersebut untuk memperlihatkan kekuatan militer serta mempermudah aksesnya kewilayah - wilayah Internasional. (John W. Garver dalam James C. Hsiung, 1983:89)

Dengan alasan ekonomi maupun geopolitik diatas, maka Indonesia merupakan salah satu komponen terpenting dalam menunjang kepentingan Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Selain berkaitan dengan masalah ekonomi, perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat juga terkait erat dengan kampanye memerangi terorisme internasional. Serangan terorisme internasional ke New York dan Washington pada tanggal 11 September 2001 memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai segmen kehidupan di Amerika Serikat, termasuk politik. Seluruh lapisan masyarakat bersatu untuk

mengatasi masa – masa sulit dalam melawan terorisme, serta memberi dukungan dan wewenang penuh kepada George W. Bush untuk berusaha memberikan perlindungan semaksimal mungkin bagi seluruh rakyat Amerika. Presiden George W. Bush yang pada awalnya kurang mendapat legitimasi dari rakyat karena tidak bisa memenangkan perolehan suara secara mayoritas dalam pemilu, kini telah mendapat kepercayaan rakyat, sehingga selalu mendapatkan dukungan penuh rakyat dalam setiap kebijakan yang diambilnya, baik di bidang ekonomi, politik, keamanan terutama dalam upaya untuk memerangi terorisme.

Kebijakan anti terorisme yang semula merupakan salah satu agenda utama domestik politik Amerika Serikat, kini telah bergeser menjadi salah satu agenda terpenting dalam kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Tanpa mengabaikan faktor – faktor lain. Faktor kerjasama suatu negara dalam memerangi terorisme internasional telah menjadi salah satu kriteria dalam menjalin hubungan luar negeri dengan Amerika Serikat. Hal ini semakin nampak dengan adanya doktrin Bush yang menyatakan bahwa *“either you are with us or against us”* dalam menilai posisi suatu negara terhadap Amerika Serikat. Doktrin tersebut telah menjadi salah satu tolak ukur dalam melihat hubungan bilateral Amerika Serikat dengan suatu negara. Negara yang berada di pihak Amerika Serikat akan mendapatkan *“reward”*, sementara mereka yang membahayakan kepentingan Amerika Serikat akan menghadapi tantangan dan tekanan dari negara adidaya tersebut. Dalam menentukan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adalah Kongres/Senat, Departemen Pertahanan, Departemen Perdagangan dan kelompok



kepentingan dan media massa. Masing – masing komponen tersebut saling mempengaruhi dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri.

3.2 Peran Departemen Pertahanan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia

Dalam menjalankan kebijakan politik luar negeri, George W. Bush dibantu oleh birokrasi politik luar negeri yang terdiri dari Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan CIA. Ketiga birokrasi inilah yang berfungsi melaksanakan kebijakan Presiden, mempersiapkan dukungan militer bila diperlukan, dan menyediakan informasi intelejen yang diperlukan Presiden. Ketiga birokrasi tersebut mengalami perubahan – perubahan orientasi sejak perang dingin berakhir. Perubahan – perubahan itu dipicu oleh adanya perubahan yang terjadi di lingkungan internasional (berkurangnya ancaman komunis, timbulnya ancaman terorisme internasional), perubahan di lingkungan domestik baik di Kongres, kelompok kepentingan, ataupun tuntutan perlindungan bagi masyarakat (tuntutan perlindungan publik dari serangan terorisme internasional). Perubahan – perubahan tuntutan dari lingkungan tersebut membuat Departemen Pertahanan juga melakukan banyak sekali reformasi intern, hal ini karena dalam konteks perang melawan terorisme Departemen Pertahanan memiliki peranan yang sangat vital, oleh karena itu pada tahun 2001, anggaran Departemen Pertahanan Amerika Serikat mencapai US\$322 milyar, dan kemudian diputuskan untuk dinaikkan menjadi 50 milyar lebih besar. Jumlah itu lebih besar dari gabungan anggaran pertahanan Inggris, Jerman, dan negara – negara Asia. Untuk

tahun 2003, menurut majalah Newsweek, besarnya makin tak tertandingi, lebih besar daripada jumlah anggaran pertahanan seluruh negara di bumi (191) negara. (Gatra 19 April 2003). Perang terhadap terorisme yang dilancarkan oleh George W. Bush bersifat komprehensif dan menyeluruh, George W. Bush ingin memberantas terorisme sampai keakar – akarnya, oleh karena itu ia membagi front perang melawan terorisme dalam dua bagian, yaitu dalam negeri dan luar negeri.

Untuk pengamanan dalam negeri, kendali dipegang Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat (Department of Homeland Security-DHS). Departemen ini berada dibawah pimpinan Menteri Tom Ridge. Cakupan kekuasaan dan kewenangan *Department of Homeland Security* sangat besar, ada empat direktorat dibawah *Department of Homeland Security*, yaitu: *Border and Transportation Security*, *Emergency Preparedness and Response*, *Science and Technology*, dan *Information Analysis and Infrastructure Protection*. Khusus direktorat *The Border and Transportation Security* (Keamanan Perhubungan dan Perbatasan), langsung membawahi instansi urusan keamanan perbatasan dan transportasi dalam satu atap. Ada tujuh instansi dibawah direktorat ini yakni mencakup pelayanan pabean, pemeriksaan tumbuhan dan hewan, hingga kesiapan domestik. Selain itu Department of Homelang Security juga membawahi direktorat *The Information Analysis and Infrastructure Protection*, direktorat ini bertugas menganalisis informasi dan intelijen dari instansi lain seperti CIA dan FBI. Keberadaan Department of Homeland Security bertujuan untuk melindungi dalam negeri Amerika Serikat dari ancaman terorisme. Amerika Serikat tidak mau

serangan teroris terulang lagi. Untuk mendukung kinerjanya Department of Homeland Security didukung dengan dana yang besar, George W. Bush mengalokasikan dana sebesar 36,2 miliar untuk tahun fiskal 2004, yang berarti lebih tinggi 7,4 persen dibanding dengan budget tahun 2003. Dengan kekuasaan yang dimiliki maka Department of Homeland Security diharapkan dapat meningkatkan pengamanan di segala lini pertahanan dan keamanan dalam negeri Amerika Serikat mulai bandara, perbatasan dan infrastruktur, sehingga dapat menjamin keamanan warga negara dan bangsa Amerika dari ancaman serangan terorisme. (Jawa Pos, 21 Maret 2003).

Ketatnya pengamanan dalam negeri Amerika Serikat di bawah Department of Homeland Security, juga sangat dirasakan oleh para imigran. Instansi urusan imigrasi dan naturalisasi (*INS – Immigration and Naturalization Service*) kini namanya sudah berubah menjadi (*Bureau of Immigration and Custom Enforcement - BICE*). Instansi ini kedudukannya bukan lagi di bawah Departemen Kehakiman atau Jaksa Agung, tapi sejak 1 Maret 2003 sudah berada dibawah DHS, melakukan pendataan ulang bagi para imigran, tidak terkecuali Indonesia. Mulai tanggal 24 Februari 2003 semua imigran yang berasal dari Indonesia diwajibkan melapor atau registrasi di kantor Keimigrasian Amerika Serikat (INS). Registrasi berlangsung hingga tanggal 25 April 2003. Ketentuan untuk melakukan registrasi bagi para imigran ini bertujuan untuk mendata ulang serta melakukan litsus bagi para imigran agar keberadaan mereka dapat dipantau serta dikontrol oleh pihak keamanan, hal ini untuk menghindari terjadinya kembali tragedi yang melibatkan para agen teroris yang masuk ke Amerika Serikat. Indonesia termasuk negara

yang masuk dalam daftar *Special registration*, hal ini mengakibatkan ketakutan bagi WNI yang menetap di Amerika Serikat, hal ini karena ada sekitar 127 ribu warga negara Indonesia yang terkena kewajiban registrasi dan sebagian besar diantaranya ilegal ataupun *out of status* (Jawa Pos, 22 Pebruari 2003)

Dengan adanya hal ini maka pemerintah Indonesia kemudian mengirimkan tim delegasi yang bertugas untuk melakukan lobi terhadap pemerintah Amerika Serikat. Delegasi tersebut terdiri dari antara lain, Ketua delegasi RI untuk urusan Wajib lapor INS Arizal efendi SH, MA, Direktur perlindungan WNI dan BHI Deplu RI Sjahwien Adenan dll. Delegasi RI tersebut khusus bertemu dengan Asisten Menlu AS untuk Asia Timur dan Pasifik James A. Kelly, Under Seretary for border and Transportation Security, di Department of Homeland Security Asa Huhinson, Deputi Jaksa Agung AS Larry D. Thomson, Pejabat Komisioner INS Michel Garcia, serta penasehat Jaksa Agung Chirs W Kobach. Delegasi RI tersebut berhasil mencapai kesepakatan dengan diandatanganinya Memorandum of Understanding (MOU) antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat yang isinya menerangkan bahwa Pemerintah Amerika Serikat memberikan jaminan kepada WNI yang terkena wajib lapor akan diperlakukan dengan baik. Selain itu ditegaskan pula bahwa tidak akan ada deportasi atau penahanan massal terhadap WNI yang *out of status*. (Jawa Pos, 22 Pebruari 2003)

Disamping pengamanan dalam negeri, Departemen Pertahanan Amerika Serikat dalam upayanya untuk mendukung pemerintah George W. Bush dalam memerangi terorisme internasional secara global juga membutuhkan dukungan dunia internasional. Untuk mendukung hal tersebut, Departemen Pertahanan

Amerika Serikat memiliki kepentingan yang besar terhadap Indonesia, hal ini mengakibatkan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri, Departemen Pertahanan selalu aktif terlibat didalamnya. Posisi geografis Indonesia yang merupakan jalur kapal selam yang memudahkan kapal – kapal selam Amerika untuk melewati lautan pasifik agar lebih cepat menuju teluk persi, dengan memanfaatkan celah – celah antar pulau. Selat – selat tersebut sangat dalam dan lebar sehingga memungkinkan untuk dilewati kapal selam. Selat Sunda memiliki kedalaman 120 kaki dan lebar minimum 12 mil, selat Lombok memiliki kedalaman 600 kaki dan lebar 12 mil, dan selat Malaka memiliki kedalaman 75 kaki dan lebar 8 mil. Dengan adanya hal itu maka akan lebih memudahkan bagi Amerika Serikat dalam menjaga stabilitas wilayah Asia Pasifik. (John W. Garver dalam James C. Hsiung, 1983:89) Selain itu Amerika Serikat juga berkepentingan menjaga kawasan Asia Tenggara dari masuknya pengaruh kelompok - kelompok yang merupakan jaringan dari teroris internasional, hal ini karena posisi Indonesia yang terdiri dari beribu ribu pulau dianggap sebagai tempat yang paling ideal bagi berkembangnya kelompok terorisme dalam menyebarkan pengaruh serta melatih kader - kadernya tanpa diketahui pihak keamanan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur FBI, Robert Mueller dalam salah satu artikel yang di harian Straits Times yang berjudul *Al-Qaeda Links in S-E Asia Still Worry US*, yang menyatakan bahwa Amerika Serikat sangat concern terhadap Asia Tenggara, sebab jaringan teroris di kawasan ini belum terlacak dengan pasti sehingga negara – negara di kawasan ini menjadi lahan subur bagi berkembangnya jaringan Al Qaeda. (Forum Keadilan, 9 Februari 2003)

Hal ini semakin terbukti dengan adanya kasus bom Bali, yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002. Serangan bom tersebut dilakukan oleh sekelompok teroris yang telah menghancurkan pusat hiburan Sari Club dan Paddy's Pub, yang mengakibatkan 184 orang meninggal dan 325 orang lainnya luka – luka. Selain meledakkan kedua tempat itu, bom juga meledak di Konsulat Amerika Serikat di Renon Denpasar. Dengan adanya kedua kasus tersebut makin meningkatkan kewaspadaan Amerika Serikat terhadap bahaya terorisme di Indonesia, hal ini bertujuan untuk melindungi warga negara Amerika Serikat yang berada di Indonesia serta aset – aset, dan kepentingan negara yang ada di negara itu. Amerika Serikat juga untuk menjaga perusahaan – perusahaan multinasionalnya di Indonesia yang selama ini selalu menjadi ancaman serangan teror. Seperti halnya yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh GAM terhadap EXXON Mobil, serta PT Freeport oleh Organisasi Papua Merdeka. Dengan makin besarnya ancaman tindak kekerasan terhadap warga negara serta kepentingan – kepentingan Amerika Serikat di Indonesia, maka semakin meningkatkan pula perhatian pemerintah Amerika Serikat, terhadap masalah keamanan di Indonesia. Peningkatan perhatian serta kewaspadaan ini dapat dilihat dari semakin diperketatnya pengamanan di Kedutaan serta kantor perwakilan Amerika Serikat, bahkan jika memungkinkan dapat melakukan penutupan sementara kantor Kedutaan dan Konsulat di Indonesia, adanya *Travel warning* bagi warga negaranya yang akan berkunjung ke Indonesia.

Dengan adanya kenyataan itu, Departemen Pertahanan juga selalu membina hubungan baik dengan Indonesia (terutama TNI) dengan memberikan

berbagai bantuan, baik berupa pelatihan – pelatihan, tukar menukar informasi dan intelejen. Hal ini agar selalu terjalin komunikasi dan kerjasama sehingga dapat mengantisipasi adanya serangan teroris yang tentu saja akan mengancam kedua belah pihak. Selain itu Amerika Serikat juga berkepentingan untuk menjual teknologi persenjataan kepada Indonesia. Karena itu, tanpa adanya kerjasama keamanan dengan Indonesia (terutama TNI), maka agenda agenda tersebut tidak akan berjalan. Adanya kenyataan tersebut maka Departemen Pertahanan lebih realistis dalam memandang kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Departemen pertahanan mendukung kebijakan politik luar negeri George W. Bush terhadap Indonesia, yang lebih mengutamakan pendekatan ekonomi dan keamanan.

3.3 Peran Departemen Luar Negeri dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri

Departemen Luar Negeri (Department of State), merupakan staf utama dalam semua hal yang berkaitan dengan hubungan internasional, yang memiliki tugas:

1. memberikan saran dan pendapat kepada Presiden mengenai hubungan internasional.
2. menyelenggarakan dan memprakarsai politik luar negeri Amerika Serikat.
3. melaksanakan semua program luar negeri yang telah di bebaskan oleh Kongres.
4. mengkaji kebijaksanaan dalam negeri yang berkaitan dengan dampak internasional.

5. membantu pengkoordinasian kebijakan politik luar negeri.
6. memajukan kementrian yang ditata berdasarkan peringkat sbb: Kantor menteri luar negeri yang mencakup wakil menteri luar negeri; Staf menteri luar negeri yang membawahi biro fungsional seperti urusan ekonomi, atau biro yang bersifat geografis; Menyelenggarakan berbagai jenis misi lapangan, terutama misi diplomatik yang dilaksanakan oleh pejabat urusan luar negeri (*foreign service officer*); memberikan kegiatan panduan kepada lembaga semi otonom seperti Peace Corps, Agency of International Development serta International Development Cooperation Agency (IDCA). (Jack C. Plano dan Roy Olton, 1999:320)

Dengan adanya perubahan yang begitu cepat yang terjadi di lingkungan domestik maupun di lingkungan internasional yang diakibatkan oleh serangan teroris 11 September 2001, mengakibatkan Departemen Luar Negeri harus menyesuaikan diri dengan kenyataan yang ada di lapangan. Departemen luar negeri tidak lagi memusatkan perhatiannya pada tantangan komunisme, akan tetapi telah bergeser pada usaha yang intensif untuk memerangi terorisme internasional, pemeliharaan perdamaian, peningkatan perdagangan luar negeri serta pengembangan demokrasi dan hak - hak asasi manusia. Dibawah kepemimpinan Colin Powell yang memiliki misi utama "*to bring Americas diplomacy into the 21 Century*", Deplu cenderung lebih memakai pendekatan yang low profile. Colin Powell berprinsip bahwa Amerika Serikat seharusnya melakukan intervensi yang sangat selektif, intervensi dan tindakan *pre-emptive* hanya akan dilakukan jika kepentingan nasional Amerika Serikat terlibat

didalamnya, dan mendapatkan dukungan dari Kongres maupun rakyat Amerika Serikat. Termasuk dalam kebijakan politik luar negerinya yang berkaitan dengan terorisme internasional. Hal ini diwujudkan dalam(Baker and John Luddy, 1993:49-50) :

1. *The Strategy of Dissuasion*, yaitu strategi yang didasarkan pada asumsi bahwa tujuan utama dari kekuatan global Amerika Serikat adalah untuk mencegah negara – negara lain supaya tidak mengancam kepentingannya dan sekutunya di beberapa kawasan penting, jika perlu melakukan penyerangan agar mereka tidak membangun kekuatannya kembali, serta mempersiapkan kekuatannya dalam menghadapi ancaman global, seperti bangkitnya Rusia dan Cina serta terorisme internasional.

2., *The Strategy of strategic Defense*, yaitu berusaha mengejar dan tidak memberikan kesempatan kepada negara lain untuk membangun dan mengembangkan kekuatannya (senjata nuklir) yang akan sangat membahayakan Amerika Serikat

3. *The Strategy of Projection*, strategi ini memungkinkan Amerika Serikat dengan cepat mengerahkan kekuatan konvensionalnya untuk melakukan serangan balik dan melakukan pengepungan serta membantu pemulihan keamanan terhadap kawasan – kawasan yang mereka anggap membahayakan.

4. *One and Half Regional Conflicts*, maksud strategi ini adalah Amerika Serikat harus mempersiapkan diri jikalau akibat dari penggunaan militernya akan merembet menjadi konflik regional.

Kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap Indonesia dibawah pemerintahan George W. Bush bertahan pada prinsip "*new conservatism*" yang berusaha merangkul semua segmen dalam masyarakat Amerika Serikat dan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu Bush terus berupaya untuk mengambil kebijakan – kebijakan baru yang cukup inovatif agar kebijakan politik yang diambilnya tidak mengakibatkan hal – hal yang kontra produktif terhadap kepentingan – kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini karena dengan makin ofensifnya serangan Amerika Serikat terhadap teroris internasional serta negara – negara yang membantu terorisme, menimbulkan protes dan serangan balasan (teror dan serangan bom) dari anggota gerakan Islam radikal (yang diklaim sebagai link dari Al Qaeda), yang tentu saja sangat membahayakan warga negara serta kepentingan Amerika di Indonesia. Amerika Serikat berusaha agar kebijakan politik luar negerinya dalam memerangi terorisme tidak diakaitkan dengan usaha memerangi agama Islam. Oleh karena itu Amerika Serikat menyiapkan strategi dengan menerapkan kebijakan politik luar negeri yang lebih mengedepankan aspek sosial yaitu dengan memberikan bantuan sosial, usaha memperluas kerjasama ekonomi, serta tetap memfokuskan pada kerjasama yang komprehensif di bidang pertahanan dan keamanan.

3.4 Peran Departemen Perdagangan USTR dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri

Serangan 11 September 2001 mengakibatkan pukulan yang hebat terhadap perekonomian Amerika Serikat, fakta menunjukkan bahwa ekonomi bergerak kearah kebuntuan. Secara keseluruhan perekonomian Amerika Serikat mengalami pertumbuhan yang kurang menggembirakan pada triwulan II 2002. PDB riil triwulan II 2002 tumbuh sebesar 1,1%, setelah dalam periode sebelumnya tumbuh cukup tinggi sebesar 5,0%. Komponen yang memberikan kontribusi bagi pertumbuhan PDB dimaksud seperti penjualan domestic, persediaan, dan perdagangan neto, menunjukkan kinerja yang menurun, yang masing-masing turun dari 3,2%, 3,5%, dan -0,7% dalam triwulan I 2002 menjadi 2,1%, 1,2%, dan -1,3% dalam triwulan II 2002. Lambatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat ini banyak dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. (www.ustr.gov)

Di sisi Internal, seiring dengan menurunnya laba perusahaan akibat melemahnya permintaan pasar, maka pendapatan dan permintaan masyarakatpun berkurang seperti terlihat pada penurunan pengeluaran konsumsi dan usaha. Jika dilihat indikator konsumsi swasta dan pengeluaran investasi domestik masing-masing mengalami penurunan dari 3,10% dan 14,2% pada triwulan I 2002 menjadi 1,90% dan -14% pada triwulan II 2002. Produksi Industri yang sedikit meningkat dari 3,2% menjadi 4,2% dalam periode yang sama tidak mampu meningkatkan kapasitas produksi sehingga berdampak kepada menurunnya investasi dan belanja modal. Melambatnya kinerja ekonomi Amerika Serikat telah berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran dari 5,6% menjadi 5,9% dalam periode yang

sama karena aktifitas perusahaan – perusahaan yang menyusut drastis. Meskipun belanja disektor ritel meningkat, tetapi peningkatan tersebut didorong oleh adanya penurunan suku bunga mortgage, namun investor tetap enggan menanamkan modal dalam jumlah besar di bisnis ini sehingga mengakibatkan tertahannya pemulihan ekonomi.

Disisi eksternal, perdagangan masih menunjukkan defisit yang meningkat akibat dari besarnya nilai import. Neraca perdagangan daam triwulan 2002 masing – masing masih menunjukkan defisit USD 116,1 miliar, dan USD 117,1 miliar(-4,4% dari PDB) yang lebih tinggi dibanding defisit sebesar USD 106,4 miliar dan USD 112,5 miliar(-4,3% dari PDB) pada periode sebelumnya. Laju inflasi pada triwulan II 2002 yang mencapai 1,3% sedikit lebih tinggi dibanding dengan periode sebelumnya yang mencapai 1,2% namun masih berada di bawah target yang ditetapkan oleh Fedres(2,5%). Rendahnya tingkat inflasi seiring dengan aktivitas ekonomi Amerika Serikat yang masih lambat dalam periode tersebut terutama dipengaruhi oleh turunnya biaya upah dan operasional. (www.bi.org/artikel/3426/2003.htm)

Kelesuan perekonomian Amerika Serikat juga berdampak pada nilai mata uang dolar Amerika terhadap mata uang lain didunia. Melemahnya dolar AS terutama dipengaruhi oleh tiga faktor yang yang memicu sentimen negatif terhadap dolar AS yaitu: 1. kinerja ekonomi AS yang belum menggembirakan (yang tercermin dari dari: belum membaiknya pengeluaran konsumsi dan keyakinan konsumen, menurunnya permintaan terhadap durable goods, meningkatnya pengangguran, turunya produksi industri manufaktur,

memburuknya pendapatan sektor korporasi, dan semakin meningkatnya defisit neraca perdagangan AS) 2. kekhawatiran terhadap bahaya inflasi, 3. jatuhnya indeks harga saham di bursa Amerika Serikat. Selain itu turunnya nilai dolar juga dipicu oleh faktor eksternal, yaitu menguatnya nilai mata uang asing lain terutama Euro dan Poundsterling akibat dari optimisme investor terhadap kebangkitan ekonomi Eropa. Selain itu juga ditunjang oleh semakin membaiknya kinerja ekonomi dikawasan lain seperti Jepang, serta negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura Thailand, Malaysia dan Indonesia.

Bursa saham di Amerika Serikat juga mengalami tekanan yang berat sebagai akibat melemahnya perekonomian di negara itu. Tekanan terhadap bursa mengakibatkan menurunnya minat dan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Amerika Serikat. Hal ini diperburuk dengan terjadinya berbagai skandal keuangan yang menimpa perusahaan – perusahaan raksasa yang tercatat di bursa saham Amerika Serikat. Seperti skandal keuangan yang menimpa perusahaan telekomunikasi terbesar di Amerika Serikat, World Com, adanya kasus investigasi atas pajak penjualan Tyco Internasional. Manipulasi pembukuan yang dilakukan oleh Xerox Corp, sehingga mengakibatkan gab revenue sebesar \$ 2 miliar. Kesalahan pembukuan yang dilakukan oleh Walt Disney Company dan perusahaan farmasi terbesar Merck. Selain itu juga diperburuk dengan adanya sinyal dari FBI mengenai kemungkinan serangan teroris baru ke AS, hal ini semakin menimbulkan sikap skeptis di kalangan investor sehingga memicu spekulasi pelarian modal keluar AS. (www.bi.org/artikel/423.htm.)

Kelesuan ekonomi yang berkepanjangan sebagai akibat serangan 11 September 2001 ini mengakibatkan banyak perusahaan raksasa Amerika Serikat mengalami kebangkrutan, sebagai mana terjadi pada perusahaan Enron. Enron dinyatakan bangkrut pada bulan desember 2001, perusahaan ini memiliki \$ 64 Milyar, dan mengalami kerugian \$ 68 Milyar. Selain itu juga banyak perusahaan yang juga gulung tikar, antara lain adalah American Airlines, maskapai penerbangan terbesar di Amerika Serikat, Conseco perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dan asuransi. Conseco memiliki asset sebesar \$ 6.5 milyar sekarang memiliki asset \$ 52.3 milyar dan mengalami hutang \$ 51.1 milyar. Selain dari ketiga perusahaan diatas, perusahaan telekomunikasi terbesar AS WorldCom juga mengalami kebangkrutan sebagai akibat skandal dalam perusahaannya. WorldCom mencatat kerugian sebesar \$ 680 juta. Kejatuhan WorldCom juga diikuti dengan kejatuhan industri telekomunikasi secara massal antar lain Siemens AG yang telah melakukan PHK terhadap 16.500 buruh, Nortel and Lucent memPHK 5.000 buruh serta NTT Do Co Mo, sebuah perusahaan multinasional mengalami kerugian sebesar \$ 6 milyar .(Prima edisi XXIX, 2003)

Untuk mengatasi hal ini maka Departemen Perdagangan Amerika Serikat berusaha keras untuk melakukan terobosan – terobosan guna menggerakkan kembali perekonomian Amerika Serikat. Untuk mengembalikan kembali kepercayaan investor terhadap perusahaan Amerika Serikat, George Bush memerintahkan SEC untuk memaksa para eksekutif perusahaan untuk melakukan revisi ulang terhadap pembukuan selama 5 tahun berturut – turut dimulai tahun 2001. George W. Bush juga mendesak Kongres agar segera menegahkan proposal

pemerintah yang berisi 10 poin legislasi yang menyangkut perbaikan pertanggung jawaban pihak perusahaan. Dia meminta pihak otoritas menyeret pihak eksekutif korporat yang melakukan manipulasi ke pengadilan. Terobosan lain yang dilakukan antara lain dengan melakukan pemotongan pajak, hal ini sangat penting untuk menarik masuknya investor ke Amerika Serikat sehingga dapat menggerakkan kembali perekonomian. Selain itu pajak yang rendah juga diharapkan mampu mengangkat daya beli masyarakat terhadap produk – produk yang dihasilkan oleh sektor industri. Sektor industri yang juga terpuruk akibat serangan terorisme, diharapkan juga mengambil inisiatif dalam memasarkan produknya antara lain dengan membuka kembali pasar yang potensial di berbagai negara. Pasar yang selama ini belum tergarap secara maksimal adalah Indonesia.

Oleh karena itu setelah terjadinya serangan teroris 11 September 2001 yang mengakibatkan kelumpuhan perekonomian Amerika Serikat, Departemen Perdagangan Amerika gencar melakukan promosi ke Indonesia. Sebagaimana yang dilakukan oleh delegasi USCC (United States Commercial Center) dipimpin oleh Atase Perdagangan Kedutaan Besar Amerika Rajendra Dheer, yang melakukan pameran dan presentasi yang memfokuskan pada masalah hubungan dagang antara Amerika dan Indonesia. Pameran yang diadakan USCC tersebut berlangsung di Surabaya pada tanggal 24 – 26 Juli 2002. Dalam pameran tersebut juga dibahas beberapa topik antara lain peluang berinvestasi di AS dan peluang untuk menjadi distributor dari produk – produk yang dihasilkan oleh perusahaan Amerika, hal ini karena saat ini banyak perusahaan AS yang ingin memiliki mitra usaha dari Indonesia. Selain itu USCC dibawah Departemen Perdagangan

Amerika Serikat juga membuka *international buyer program*, International Buyer Program mengatur para pengusaha yang meminati produk atau servis dari Amerika Serikat, membantu mengatur perjalanan, akomodasi dan pertemuan bisnis, serta membantu menemukan supplier produk Amerika Serikat yang sesuai.

Selain itu Departemen Perdagangan bekerjasama dengan USCC inembuka program Commercial News USA (CNUSA). Yang merupakan tempat dimana eksportir Amerika Serikat bertemu dengan importir dari berbagai negara, termasuk Indonesia, untuk menjalin suatu hubungan bisnis yang sukses. CNUSA dirancang untuk membantu importir dari seluruh dunia untuk mendapatkan produk atau servis dari Amerika Serikat yang mereka butuhkan. distributor, lisensi, joint-venture atau bentuk lainnya (www.ustr.org). Dengan adanya kenyataan bahwa Indonesia memiliki arti yang penting bagi perekonomian Amerika Serikat, maka USTR selalu berusaha agar kebijakan politik yang dikeluarkan Pemerintah dapat melindungi kepentingan ekonomi kedua belah pihak, baik Indonesia maupun Amerika Serikat

3.5 Peran Kongres dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri

Kongres

Kongres memiliki pengaruh yang besar dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Sebagaimana yang tertuang dalam Konstitusi pada ayat 8, artikel I yang menyebutkan bahwa: Kongres memiliki kekuatan untuk mengumumkan perang ..mengirimkan dan mendukung pasukan ... dan mendukung angkatan laut Amerika, juga dalam ayat 9, artikel I dikatakan bahwa : tidak ada dana yang akan dikeluarkan dari kekayaan negara, kecuali dalam

penyediaannya harus dengan konsekuensi dibuat berdasarkan undang – undang. Ayat 2 Artikel II juga memberikan kekuasaan kepada Presiden untuk membuat perjanjian, tetapi hanya dengan bila 2/3 anggota senat yang hadir menyetujuinya. (Stephn E. Ambrose, 1991:124) Selain itu peningkatan peran Kongres juga disebabkan oleh semakin meningkatnya asertifikasi Kongres dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri yang menjadi realitas politik pasca perang dingin. Perubahan yang terjadi di Kongres yang membuat Kongres makin aktif terlibat dalam urusan kebijakan politik luar negeri disebabkan oleh :

a. Faktor sosial.

Faktor social terdiri dari kelompok kepentingan dan media massa. Meningkatnya aktifitas kelompok kepentingan yang memberikan masukan yang semakin banyak dan bermanfaat bagi anggota Kongres dalam mempengaruhi kebijakan eksekutif Interaksi yang makin intensif antara Kongres dan kelompok kepentingan seringkali mengakibatkan persaingan antar berbagai kelompok kepentingan

- Media massa dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh Kongres. Anggota Kongres menjadika berita – berita yang ada di media massa baik cetak maupun elektronik sebagai salah satu sumber informasi yang digunakn untuk mengkritisi kebijakan pemerintah serta digunakan untuk menyerap aspirasi yang diungkapkan oleh konstituennya. (Ralp G. Carter, 1998:119)

Faktor institusional

- Faktor yang berasal dari dalam tubuh kongres sendiri dalam bentuk peningkatan pengaruh komisi tetap dan sub komisi yang mengurus kebijakan politik luar negeri. Sub komisi di Senat dan House of Representatif sangat berpengaruh dalam menggagalkan proposal yang diajukan eksekutif karena semua anggaran federal harus mendapatkan persetujuan Kongres. Bahkan secara khusus komisi Apropriasi yang memberikan otorisasi atau pendanaan kebijakan politik luar negeri merupakan sarana institusional bagi Kongres untuk meningkatkan asertifikasi Kongres. (Ralp G. Carter, 1998:122)

Dengan makin meningkatnya peranan Konggres dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri, maka setiap kebijakan politik luar negeri yang akan diambil oleh Presiden harus mendapat persetujuan dari Konggres. Baik di Konggres ataupun disenat memiliki komite – komite masalah luar negeri, jika di HOR disebut komite masalah luar negeri sedangkan di Senat disebut komite hubungan internasional. Keduanya berfungsi sebagai badan atau lembaga yang membantu Presiden dalam pelaksanaan dan terutama pengawasan politik luar negerinya. Tugas ini terutama dijalankan oleh komite yang ada di Senat karena dalam mengadakan perjanjian dan hubungan luar negeri, pemerintah haruslah selalu berkonfirmasi dengan Senat. Senat juga cenderung lebih memfokuskan perhatiannya pada kebijakan luar negeri pemerintah, bukan pada masalah dalam negeri yang lebih terkait dengan kepentingan rakyat Amerika Serikat. Sikap ini didasarkan pada anggapan bahwa sebagai utusan pemerintah negara bagian,

anggota Senat tidak harus selalu mempertanggung jawabkan tugasnya pada rakyat secara langsung seperti anggota House Of Representatif (Kongresman).

Pada pemilu presiden tahun 2000 yang dimenangkan oleh Partai Republik, George Bush berhasil meraih 271 electoal college. Partai Republik juga berhasil mempertahankan posisi mayoritas di House of Representatif meski dengan selisih suara yang tipis (221 kursi untuk Partai Republik, dan 212 Partai Demokrat). Sementara posisi mayoritas di Senat telah beralih ke tangan Demokat, dengan jumlah 50 kursi Demokrat dan 49 Republik serta 1 independe. Dengan komposisi di Kongres tersebut Bush memiliki tantangan keras dalam melolosan program – program kebijakannya.

Akan tetapi dengan gencarnya kampanye George W. Bush dalam memerangi terrorisme internasional telah mempengaruhi opini masyarakat Amerika Serikat, menurut hasil jajak pendapat yang dilakukan CNN dan majalah Time pada 17 – 18 Desember 2002, menunjukkan bahwa 50% responden percaya terhadap kepemimpinan George W. Bush, dan 50% responden akan memilih kandidat dari Partai Republik dan hanya 43% yang akan memilih kandidat dari partai Partai Demokrat. Hal ini tercermin juga dari jejak pendapat yang dilakukan majalah Newsweek yang menunjukkan bahwa 71 persen warga Amerika Serikat mendukung dilakukannya serangan terhadap basis terrorisme. Jajak pendapat serupa juga dilakukan oleh surat kabar New York Times dan jaringan televisi CBS yang memperlihatkan bahwa 85 persen dari responden menyetujui dilancarkannya tindakan militer pada pihak – pihak yang bertanggung jawab terhadap tragedi itu. (www.cnn.com)

Secara politis, rating dukungan rakyat terhadap George Bush yang pada awalnya tidak begitu tinggi karena tidak berhasil memenangkan suara mayoritas, nampak semakin tinggi seiring dengan keberhasilan Bush dalam mengkampanyekan perang terhadap terorisme. Sehingga secara umum rakyat menyetujui dan mendukung berbagai langkah yang dilaksanakan George Bush, baik bidang ekonomi, politik, dan keamanan.

Dengan adanya hal tersebut maka Konggres yang semula cenderung bipartisan dalam berbagai isu dan selalu berseberangan dengan Pemerintah, kini telah menyingkirkan perbedaan partisan dan bersatu dalam menghadapi ancaman terorisme. Kongres juga memberikan dukungan yang kuat kepada George Bush dalam menangani berbagai akibat dari serangan terorisme 11 September 2001, dan melakukan langkah antisipasi guna melindungi rakyat dan negara dari serangan lanjutan terorisme terhadap rakyat Amerika Serikat dimanapun mereka berada.

Dalam konteks, memerangi terorisme internasional, Amerika Serikat bekerjasama dengan negara - negara lain di dunia, berusaha menciptakan stabilitas keamanan di berbagai kawasan di dunia. Di kawasan Asia Tenggara yang disinyalir sebagai tempat berkembangnya jaringan terorisme Al Qaeda, Amerika Serikat bekerjasama dengan Indonesia, yang merupakan negara kunci di kawasan ini. Akan tetapi kerjasama keamanan dan militer antara Indonesia dan Amerika Serikat sedikit mengalami kendala. Kendala ini antara lain adalah adanya sebagian anggota Konggres yang menentang kerjasama militer antara Indonesia dan Amerika Serikat yang diakibatkan oleh banyaknya pelanggaran HAM yang

dilakukan oleh militer Indonesia (TNI) antara lain dalam kasus di Timor Timur, Aceh dan Papua. Hal ini mengakibatkan dikeluarkannya Leahy Amendment pada 1999 yang dipelopori oleh senator Patrick Leahy, yang intinya melarang Amerika Serikat menjalin kerjasama militer dengan Indonesia sebelum TNI mereformasi diri.

Akan tetapi dengan adanya serangan terorisme 11 September 2001, serta perubahan prioritas kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang menuntut kerjasama dengan negara lain dalam memerangi terorisme, dan didukung oleh semakin komprehensifnya TNI dalam mereformasi dirinya, dengan ditandai diajukannya beberapa perwira TNI ke pengadilan akibat pelanggaran HAM. Mengakibatkan anggota Kongres Amerika Serikat semakin mencairkan sikap kerasnya terhadap Indonesia. Perubahan ini juga didukung oleh lobi yang dilakukan oleh beberapa perusahaan industri besar seperti Boeing, United Technologies, General Electric, Nike dan Coca - Cola kepada anggota senat dan Kongres serta pejabat pemerintah Amerika Serikat melalui dewan usaha Amerika - ASEAN, agar pemerintah segera mencabut embargo penjualan senjata terhadap Indonesia. (Tempo 12 Mei 2002)

Selain itu dalam Kongres Amerika Serikat juga dibentuk sebuah forum informal yang didalamnya menguimpun para anggota Kongres Amerika Serikat yang ada di House ataupun di Senat, yang memiliki kepedulian terhadap Indonesia dalam upaya untuk meningkatkan lobi Indonesia di kedua institusi tersebut. Forum tersebut dibentuk pada bulan september 2002, yang diberi nama Congressional Coordinating Group on Indonesia (CCGI). Dengan adanya

berbagai lobi tersebut maka Kongres Amerika Serikat akhirnya menyetujui kerjasama militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Indonesia.

3.6 Peran Interest group dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat

Kelompok kelompok kepentingan (interest groups) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur masyarakat Amerika Serikat, karena melalui kelompok interest inilah mereka bisa menyampaikan gagasan, kebutuhan serta pandangan mereka kepada pemerintah. Selain itu dalam struktur formal maupun tradisi informal dari system perpolitikan Amerika memberikan peluang yang besar bagi tumbuh dan berkembangnya kelompok – kelompok kepentingan. Pada masa pasca perang dingin peran kelompok kepentingan dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri semakin besar hal ini dipengaruhi oleh berapa factor antara lain :

1. Perubahan yang terjadi di Kongres.

Pertama, komisi - komisi di Konggres saat ini semakin meningkatkan peran dan pengaruh mereka, baik lewat komisi tetap ataupun sub komisi dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Subkomisi di Senat dan House of Representatif sangat berpengaruh dalam menggagalkan proposal yang diajukan eksekutif, karena semua anggaran federal harus mendapat persetujuan dari Konggres. Perubahan di tingkat Kongres ini merupakan jalan masuk bagi kelompok kepentingan untuk ikut serta dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. (James M. Mc Cormick, 1998:174)

Kedua, sesuai dengan ketentuan dalam trade Act 1974, pemerintah diwajibkan untuk memperhatikan nasehat dari kelompok – kelompok swasta dalam melaksanakan perundingan dagang. Mereka dapat terdiri dari : 1. komisi yang berasal dari sektor –sektor utama dalam masyarakat, 2. komisi yang terdiri dari sector industri, pertanian, buruh, dan sector lainnya, 3. komisi yang mewakili kelompok yang terpengaruh dengan perundingan tersebut 4. komisi yang mewakili pemerintah negara bagian dan pemerintah local. (James M. Mc Cormick, 1998:188)

Ketiga, bantuan ekonomi dan militer ataupun penjualan senjata yang dilakukan oleh eksekutif harus dilaporkan dan dievaluasi oleh Kongres. Proses inilah yang kemudian memberikan peluang bagi kelompok – kelompok kepentingan dalam upaya untuk mempengaruhi kongres dalam penentuan akhir dari proposal penjualan senjata tersebut. (James M. Mc Cormick, 1998:188)

Keempat, kelompok kepentingan juga memberikan keuntungan bagi Kongres. Hal ini karena dapat membantu memberikan saran dan masukan bagi Kongres dalam penyusunan rancangan undang - undang. Selain itu dukungan dari kelompok kepentingan juga sangat menguntungkan Kongres dalam pemilihan .

2. Perubahan sosial.

Perubahan domestik dalam masyarakat pasca 11 September 2001 membuat kelompok kepentingan makin aktif dalam meningkatkan tekanan tekanan untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Hal ini karena pertimbangan domestik telah lama menjadi factor pertimbangan yang penting dalam perumusan kebijakan politik luarnegeri. Masyarakat Amerika menganggap

bahwa keputusan keputusan yang menyangkut persoalan luar negeri harus diperlakukan sebagaimana politik dalam negeri.(David Rieff,1996:5). Kelompok kepentingan yang paling berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat antara lain adalah Perusahaan Multinasional dan Perusahaan industri senjata yang tergabung dalam Military Industrial Complex.

3.6.1 Multinational Corporation

Multinational Corporation merupakan salah satu aktor yang penting dalam mempengaruhi proses pembuatan suatu kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Peran Perusahaan Multinasional tidak dapat diabaikan terutama dalam era interdependensi ekonomi seperti saat ini. Menurut David C.Korten di Amerika Serikat, perusahaan multinasional telah terlibat selama lebih dari 150 tahun dalam proses merestrukturisasi aturan dan institusi pemerintah agar cocok dengan kepentingan kapitalistik mereka, setidaknya kepentingan perusahaan multinasional yang ikut menentukan agenda politik badan - badan negara dan internasional, meskipun secara realitas dan implikasinya tidak disadari.(David C. Korten,1997:90) Perusahaan multinasional juga dipandang oleh para ilmuwan hubungan internasional sebagai "*the most important actor of international relation is not the state, but there are many actor, and the Multinational Corporation a part of them*".

Perusahaan multinasional telah berkembang sebagai salah satu aktor yang berpengaruh dalam proses kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat hal ini karena para pengusaha internasional tersebut menyakini bahwa *no money no power*, selain itu perusahaan multinasional juga memiliki akses lobi ke lembaga -

lembaga yang memutuskan kebijakan politik luar negeri. Sebagai mana yang diungkapkan Korten, bahwa perusahaan multinasional telah masuk dalam:

1. *The Council of Foreign Affair*, adalah sebuah lembaga yang digunakan sebagai wadah pertemuan bagi anggota - anggota perusahaan multinasional yang berpengaruh dengan lembaga - lembaga pembuat kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Council ini menempatkan dirinya sebagai tempat untuk menyatukan pandangan - pandangan yang bertentangan antar anggotanya. Aktivitasnya diselenggarakan dalam bentuk jamuan makan dan program studi bagi para anggotanya dan seringkali melibatkan tokoh - tokoh dunia yang berpengaruh atau pemikir - pemikir kebijakan politik luar negeri. Dewan ini juga memiliki jurnal yang sangat berpengaruh yaitu *Foreign Policy* yang merupakan ajang untuk berdebat terbuka mengenai isu - isu penting tentang kebijakan politik luar negeri. Dewan ini mendapat dana terbanyak dari Perusahaan - perusahaan multinasional sehingga hampir dapat dipastikan bahwa kepentingan Perusahaan multinasional akan selalu diagendakan dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Oleh karena itu lembaga ini sering disebut sebagai *The Hidden Decision Maker*. (David C. Korten, 1997:203-214) Lembaga ini juga ikut memberikan rekomendasi kepada pemerintah Amerika Serikat agar melakukan tindakan pro aktif dalam melindungi kegiatan usaha EXXON dan Freeport di Indonesia, yang selama ini banyak mengalami hambatan.

2. *Bilderberg*, nama yang diambil dari salah satu hotel berbintang di Belanda yang bernama Hotel de Bildenberg of Oosterbeek, yang digunakan sebagai tempat bertemunya para pemimpin perusahaan multinasional, politikus, pejabat diplomatic luar negeri dan orang – orang berpengaruh lainnya. (David C. Korten, 1997:220).

3. *Trilateral Commission* (komisi trilateral), merupakan pertemuan untuk madukan kepentingan ekonomi dari ketiga mitra regional Amerika Utara (AS dan Canada), Eropa Barat dan Jepang. Komisi trilateral dibentuk oleh David Rockefeller, ketua Chase Manhattan Bank dan Zbigniew Brzezinski. Komisi ini dipimpin secara kolektif yang terdiri dari pemimpin empat dari lima transnasional non perbankan terbesar dunia, pejabat puncak lima dari enam bank internasional terbesar di dunia, dan pemimpin pemimpin organisasi media terbesar. (David C. Korten, 1997:228)

Ketiga forum tersebut yaitu Council of Foreign Relations, Bilderberg, dan Komisi Trilateral mengumpulkan pemimpin – pemimpin Perusahaan multinasional yang saling bersaing dan pemimpin – pemimpin partai politik untuk melakukan diskusi tertutup dan pembinaan consensus yang tidak pernah diketahui umum. Publikasi yang dihasilkan merupakan perspektif ideologis para pengusaha dan kapitalisme yang dapat berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat.

4. Selain dari ketiga forum diatas juga ada suatu lobi bisnis yang memungkinkan pihak perusahaan multinasional dapat mempengaruhi

kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, yaitu Meja Bunder (Round Table) bisnis yang merupakan asosiasi nasional para CEO perusahaan transnasional terbesar di Amerika Serikat. Didirikan di Amerika Serikat pada tahun 1972 beranggotakan 200 orang yang terdiri dari 42 diantara 50 Perusahaan multinasional terbesar di Amerika Serikat kategori majalah Fortune, 7 Bank komersial terbesar Amerika Serikat, 7 dari sepuluh perusahaan asuransi terbesar Amerika Serikat, 5 dari 7 perusahaan Ritel terbesar di Amerika Serikat, 7 dari delapan perusahaan transportasi terbesar Amerika Serikat, 9 dari sebelas perusahaan utilitas terbesar di Amerika Serikat. Dalam forum ini para anggotanya berusaha mengesampingkan perbedaan - perbedaan mereka untuk menghasilkan consensus tentang suatu masalah sehingga dapat menyatukan visi yang dapat diajukan sebagai salah satu agenda yang dapat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan politik luar negeri. Forum ini juga gencar mengkampanyekan keberadaannya agar dapat diterima dan diakui secara politis. Hal itu dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya komunikasi yang ada dengan membujuk rakyat Amerika melalui tajuk rencana, siaran pers, dan komentar - komentar radio dan televisi serta melakukan kunjungan pribadi yang dilakukan oleh para CEO perusahaan multinasional anggota Round Table kepada para anggota Senat dan Konggres Amerika Serikat. Oleh karena itu perusahaan multinasional memiliki pengaruh yang kuat dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. (David C. Korten, 1997:267)

3.6.2 MIC (Military Industrial Complex)

Amerika Serikat merupakan negara produsen peralatan persenjataan militer terbesar didunia, jutaan milyar dolar telah tercurah untuk penelitian, pembuatan serta pengembangan peralatan militer, dimana sekitar 75% dari seluruh dana penelitian dan pengembangan digunakan di sektor militer atau sektor yang berhubungan dengan militer. Perusahaan militer Amerika Serikat mendapatkan keuntungan yang besar dari hasil penjualan senjata, tank, pesawat tempur, kapal perang serta peralatan pengintai (radar) dan senjata mematikan lainnya. Oleh karena itu, kini industri militer merupakan pemain yang memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Amerika Serikat. Selain itu jutaan tenaga kerja di Amerika Serikat juga sangat bergantung pada besar kecilnya pemesanan atau pembelian peralatan militer. Penjualan peralatan – peralatan militer telah mendukung perkembangan sektor manufaktur, dimana lebih dari sepertiga dari keseluruhan ilmuwan dan tenaga ahli, serta lebih dari 900.000 orang Amerika Serikat bekerja dalam bidang militer ataupun bidang yang berkaitan dengan militer. Perusahaan – perusahaan ini kebanyakan sangat bergantung pada kontrak dari Departemen Pertahanan, selain itu departemen pertahanan bersama perusahaan persenjataan utama juga mengatur organisasi perusahaan - perusahaan industri militer. Oleh sebab itu jalinan kerjasama antara Departemen Pertahanan dengan perusahaan – perusahaan produsen senjata telah memiliki pengaruh yang besar baik dalam mendukung perekonomian Amerika Serikat maupun dalam proses kebijakan politik di bidang pertahanan.

Top US Corporations in Aerospace and Defense, 2001 (in \$ million)

Employees	Revenues (2000)	Profits	Rank*
<i>Boeing</i> 198,000	51,321	2,128	15
<i>United Technologies</i> 153,800	26,583	1,808	64
<i>Lockheed Martin</i> 126,000	25,329	(519)	69
<i>Honeywell Int'l</i> 125,200	25,023	1,659	71
<i>Raytheon</i> 93,696	18,321	141	111
<i>Textron</i> 71,000	13,090	218	150
<i>General Dynamics</i> 43,300	10,359	901	180
<i>Northrop Grumman</i> 39,300	8,287	608	232
<i>BF Goodrich</i> 26,322	5,532	326	322
<i>Sequa</i> 11,550	1,773	24	773

Precision Castparts 1,674 85 809

13.090

**Top 1,000 revenues rank*

Source: *Fortune One Thousand, 16 April 2001*

Top Global Corporations in Aerospace and Defense, 2001 (in \$ million)

Company	Country	Revenues	Profits
Rank*(2000)			
<i>Boeing</i>	<i>US</i>	<i>51,321</i>	<i>2,128</i>
1			
<i>United Technologies</i>	<i>US</i>	<i>26,583</i>	<i>1,808</i>
2			
<i>Lockheed Martin</i>	<i>US</i>	<i>25,329</i>	<i>(519)</i>
8			
<i>Honeywell Int'l</i>	<i>US</i>	<i>25,023</i>	<i>1,659</i>
3			
<i>Raytheon</i>	<i>US</i>	<i>18,321</i>	<i>141</i>
6			
<i>EADS</i>	<i>Netherlands</i>	<i>17,954</i>	<i>(835)</i>
9			
<i>BAE Systems</i>	<i>Britain</i>	<i>14,626</i>	<i>(20)</i>
7			

<i>Textron</i>	<i>US</i>	<i>13,090</i>	<i>218</i>
5			
<i>General Dynamics</i>	<i>US</i>	<i>10,359</i>	<i>901</i>
4			

**Rank of Profits within industry, Source: Fortune Global Five Hundred, 23 July 2001*

Military Industrial Complex yang merupakan sebuah kelompok kepentingan (interest group) yang didefinisikan sebagai "*powerful domestic groups within the major states that have vested in military and international tension*". (Walter S. Jones, 1991, 408) MIC mempunyai pengaruh yang sangat signifikan dalam pengambilan keputusan politik luar negeri Amerika Serikat, seiring dengan terjadinya pergeseran dalam struktur pemerintahan Amerika Serikat. Dahulu Departemen Luar negeri menempati rangking terbesar dalam jumlah staf, anggaran dan pengaruh. Namun sejak Perang Dunia II telah digeser oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan. Dengan adanya pergeseran tersebut sebagai sebuah interest group, yang merupakan kelompok atau asosiasi perusahaan produsen senjata utama yang salah satu bagian intinya terdiri atas sekitar 41 organisasi/ perusahaan swasta yang military oriented tetapi bebas pajak dengan anggota gabungan lebih dari 6 juta orang beberapa diantaranya menjadi organisasai lebih dari satu organisasi, dengan anggaran operasional pertahun hampir mencapai US \$ 16 juta. Organisasi itu mencakup Air Force Association, The American Legion, The Association of The United States Army, The non Commision Officers of the USA, The Retaired Officer Association, The Fleet

Reserve Association, The Marine Corp League, The National Guard Association of the United States dan Narat Reserve Association (Robert Sherril,1978:131)

MIC di Amerika Serikat bekerja sama dengan produsen senjata dari negara lain, mensuplai dunia dengan produk senjata yang sangat menguntungkan dalam dunia bisnis. Sebagai sebuah kekuatan lobby MIC mempunyai kepentingan untuk mempertahankan eksistensinya, yaitu, menjaga agar industri militer terus berlangsung serta meraih keuntungan yang sebesar – besarnya. Oleh karena itu untuk di dalam negeri, MIC berusaha melakukan lobby agar anggaran belanja militer tetap tinggi dengan cara menerapkan tekanan tekanan dan bujukan yang terorganisasi kepada para pengambil keputusan. MIC harus menjaga agar permintaan produksi senjata selalu mengalir, hal inilah yang merupakan titik sentral dari kerja kelompok kepentingan ini. Sehingga MIC dapat digolongkan sebagai sebuah kelompok kepentingan yang menggunakan pengaruh *reward – coercion* yaitu: *The manipulation of positive and negative incentive to achieve objectives. Promised rewards include distribution of value in favor of influenced actor if his behavior accords with the wishes of the influencer. Promised rewards may include reduction cessation of negatives incentive* (Raymond F Hopkins & Mansbach,1973:63) Besarnya pengaruh bisa diukur dari kapasitas yang didasarkan pada sumberdaya sang aktor yang mempengaruhi : *Influence is this inferred from resources , specially actor's control over those relevant to reward and depreation : wealth, weapons, moral force and so on* (pengaruh dihasilkan dari sumber daya, khususnya kemampuan si aktor menguasai apa – apa yang

relevan dengan hadiah dan kerugian : harta benda , senjata, kekuatan moral, dll. (Raymond F Hopkins & Mansbach, 1973:64)

Dalam mempertahankan kepentingannya yaitu mempertahankan dan meningkatkan anggaran militer baik di Amerika Serikat ataupun di negara lain, MIC selalu membina hubungan baik dengan departemen pertahanan. Hubungan kerjasama antara MIC dan Departemen Pertahanan akan membantu menciptakan bisnis dan pasar baru, misalnya hubungan antara CIA dan Bethel, yang difasilitasi oleh direktur utama CIA Alan Dulles, dan bendahara Steve Bethel, John Simso. Hubungan antara Bethel dan CIA telah menghasilkan kerjasama hubungan intelejen yang membantu merobohkan rezim di Iran th 1953 dan Soekarno di Indonesia. Selain itu kekuatan konsolidasi industri senjata juga memberikan pengaruh yang besar terhadap Departemen Pertahanan. Hal ini mengakibatkan Departemen Pertahanan tidak memiliki banyak pilihan dalam mendapatkan pasokan senjata. Misalnya dalam bidang pesawat tempur, dimana Boeing bekerjasama dengan Lockheed Martin dalam salah satu sistem utama yaitu pembuatan pesawat tempur F22 dan persaingan dalam sistem lain(masalah joint strike fighter), hubungan kerjasama ini menciptakan kemungkinan untuk menyerap anggaran pertahanan yang besar sehingga menaikkan anggaran Departemen Pertahanan.

Selain memiliki pengaruh yang besar di lingkungan birokrasi terutama di Departemen Pertahanan, MIC juga memiliki pengaruh yang besar di lingkungan Senat dan Kongres. Hal ini karena perusahaan – perusahaan produsen senjata yang tergabung dalam MIC, selalu berperan aktif dalam proses pemilihan umum

anggota Senat dan Kongres. Mereka memberikan kontribusi yang besar terhadap proses kampanye dari masing – masing kandidat partai, terutama dalam masalah dana kampanye. Lebih dari \$13.5 milyar telah mereka sumbangkan untuk dana kampanye. Pada kampanye pemilihan presiden tahun 2000 MIC memberikan sumbangan dana sebesar \$ 3.007 509 kepada partai Republik dan sebesar \$2.061.541 pada partai Demokrat. Sementara itu perusahaan produsen senjata terbesar, Lockheed Martin menyumbang \$ 549. 007 untuk anggota Kongres dari partai Republik dan \$ 326.392 untuk anggota Kongres dari partai Demokrat.

Top Defense Contractor Contributions in 2000 Elections

Rank	Organization	Amount	Dem.	Rep.
1	Lockheed Martin	\$2,109,475	39%	60%
2	General Dynamics	\$1,162,005	40%	60%
3	Raytheon Corp.	\$837,995	38%	61%
4	United Technologies Corp.	\$638,720	46%	53%
5	Northrop Grumman Corp.	\$602,680	42%	57%
6	Science Applications International Corp.	\$582,085	38%	61%
7	Newport News Shipbuilding	\$533,004	30%	69%
8	TRW Inc.	\$459,719	21%	79%
9	Textron Inc.	\$446,580	32%	68%
10	Boeing Corp.	\$347,484	39%	61%
11	General Electric	\$302,750	43%	57%
12	Honeywell International	\$293,181	34%	66%

13	General Atomics	\$291,500	41%	59%
14	Litton Industries	\$289,199	29%	70%
15	BAE Systems North America	\$231,290	40%	60%
16	United Defense	\$227,100	17%	83%
17	Cubic Corp.	\$194,169	8%	92%
18	Harris Corp.	\$183,174	2%	98%
19	Litton Industries	\$172,325	6%	94%
20	Verizon Communications	\$157,398	37%	63%

Source: Center for Responsive Politics, <http://www.opensecrets.org/>, based on data released electronically by the FEC January 2, 2001.

Dengan adanya hal tersebut maka akan semakin memudahkan MIC dalam mempengaruhi kebijakan politik yang diambil oleh Pemerintah atas persetujuan Senat dan Kongres, hal ini karena wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu telah memiliki hubungan yang erat dengan mereka, sehingga kebijakan - kebijakan yang diambil selalu menguntungkan MIC.

Dalam program kampanye pemberantasan terorisme pasca 11 September 2001 yang dilancarkan George W.Bush, industri militer memiliki peranan yang sangat penting. Perusahaan persenjataan utama seperti Boeing, Raytheon, dan Lockheed Martin akan mendapatkan lebih banyak keuntungan, karena sebagian besar anggaran dialokasikan pada proyek militer, serta peralatan dan teknologi anti terorisme. Oleh karena itu Kongres telah menyetujui dana sebesar 40 milyar

yang digunakan untuk rekonstruksi dan usaha anti terorisme, selain itu Sekretaris pertahanan Donald Rumsfeld telah menganggarkan dana sebesar 400 milyar untuk meningkatkan kekuatan militer dan perang melawan terorisme. Disamping pengeluaran untuk militer, dalam upaya pemberantasan terorisme, Amerika Serikat juga berkepentingn untuk mempertahankan eksistensinya sebagai polisi dunia dan harus mampu menciptakan "Order dan Stabilitas" di bidang pertahanan maupun ekonomi untuk menunjang pasar bebas (liberalisasi perdagangan).

Untuk menciptakan stabilitas keamanan dan ekonomi internasional dan memerangi terorisme internasional, Amerika Serikat telah menyiapkan program assistensi, bantuan militer dan bimbingan serta pelatihan bagi negara – negara di berbagai kawasan agar mereka dapat bekerja sama dengan Amerika Serikat dalam memerangi terorisme. Sebagaimana yang terjadi di Filipina, Amerika Serikat membantu tentara Filipina untuk memerangi kelompok Abu Sayyaf yang diduga merupakan kelompok teroris yang memiliki hubungan (link) dengan Al Qaeda.

Di Indonesia, upaya Amerika Serikat dalam melawan terorisme internasional, diimplementasikan dalam kerjasama militer yang komprehensif bagi kedua negara, setelah sebelumnya mengalami ketegangan. Ketegangan hubungan militer Indonesia dan Amerika Serikat dipicu oleh terjadinya berbagai pelanggaran HAM di Indonesia, yang mengakibatkan pembekuan hubungan militer Amerika Serikat – Indonesia (embargo). Kerjasama anti terorisme Indonesia dan Amerika Serikat diwujudkan dalam berbagai pelatihan, kerjasama intelejen dan pencabutan embargo senjata bagi Indonesia (khusus non lethal weapon). Dengan adanya pencabutan embargo senjata, serta kerjasama militer

yang lebih luas akan lebih menguntungkan Amerika Serikat. Selain dapat melindungi perusahaan multinasional dan kepentingan – kepentingan Amerika Serikat di Indonesia. Kerjasama militer juga sangat menguntungkan bagi MIC, karena dapat membuka pasar baru bagi produksi senjata yang mereka produksi. Hal ini dapat kita lihat dengan dilakukannya ekspor suku cadang Harculec C-35 yang menguntungkan Boeing dan Lockheedmartin sebagai produsen. Oleh karena itu perang terhadap terorisme sebenarnya sangat menguntungkan bagi MIC karena dapat menjamin kontinuitas permintaan pasar internasional akan produk – produk mereka.

3.7 Peran Media Massa dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat

Peningkatan partisipasi kongres dalam prose pembuatan kebijakan politik luar negeri berpengaruh terhadap sikap media massa. Media massa merupakan sarana yang digunakan oleh masyarakat luas maupun Kongres untuk membentuk opini publik. Oleh karena itu media massa kemudian dimanfaatkan sebagai saluran untuk mempengaruhi kebijakan politik luar negeri

Media elektronik menyediakan liputan - liputan khusus bagi para Senator dan Kongresman untuk membentuk pendapat umum, dengan mengadakan konferensi -konferensi pers tentang berbagai peristiwa yang sedang terjadi di masyarakat. Mereka juga menulis berbagai artikel dalam rubrik opini di media – media massa nasional atau mengirimkan pernyataan – pernyataan pers sebagai upaya untuk membentuk opini publik.

Peningkatan interaksi antara media massa dengan dengan anggota Kongres juga mendorong munculnya peliputan media yang terfokus pada isu – isu yang dapat berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Gencarnya upaya Kongres dan kelompok kepentingan dalam mengangkat isu tentang terorisme internasional ke dalam proses pembuatan kebijakan politik luar negeri dengan sendirinya juga mempengaruhi media massa dalam peliputan tentang terorisme internasional khususnya dalam hubungannya dengan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat

Antara media massa, Kongres, kelompok kepentingan dan pemerintah Bush cenderung saling mempengaruhi. Pihak Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Departemen Pertahanan berusaha memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi publik demi menjaga kepentingan eksekutif agar tidak kehilangan legitimasinya di masyarakat. Sebaliknya Kongres dan kelompok kepentingan juga memanfaatkan media massa untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan politik luar negeri pemerintah George W. Bush.

Media massa di Amerika Serikat pada dasarnya membantu menciptakan gambaran nyata tentang perkembangan yang dicapai pemerintah Amerika Serikat dalam upaya perang terhadap terorisme internasional khususnya di Indonesia. Kebebasan pers di Amerika Serikat memainkan peran yang sangat penting dalam mempengaruhi proses pembuatan kebijakan politik luar negeri. Liputan yang dibuat oleh para wartawan media Amerika Serikat di Indonesia, khususnya pada masalah yang berkaitan dengan terorisme internasional, ikut membentuk opini publik di Amerika Serikat yang dengan sendirinya akan mempengaruhi proses

pengambilan kebijakan politik luar negeri pemerintah George W. Bush yang berkaitan Indonesia.



BAB V
Kesimpulan

UNITAS UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Isu terorisme internasional telah mengakibatkan perubahan yang sangat mendasar pada pola kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Usaha pemberantasan terorisme internasional yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat tidak terbatas pada aktor - aktornya, tetapi telah berkembang menjadi penumpasan terhadap jaringan organisasinya, bahkan negara - negara yang dianggap sebagai pelindung dan sponsor tindakan terorisme. Saat ini, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat terhadap negara lain lebih didasarkan pada seberapa besar komitmen negara tersebut dalam membantu Amerika Serikat untuk memberantas terorisme internasional.

Indonesia yang merupakan salah satu negara kunci di kawasan Asia Tenggara, memiliki peran yang sangat strategis bagi Amerika Serikat, selain dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dianggap sebagai barometer stabilitas keamanan di kawasan Asia Tenggara. Dalam usaha untuk memerangi terorisme internasional, Amerika Serikat sangat mengharapkan kerjasama yang aktif dari pemerintah Indonesia, hal ini karena Indonesia selama ini dicurigai sebagai salah satu tempat yang memungkinkan bagi berkembangnya jaringan terorisme internasional di kawasan Asia Tenggara.

Selain untuk bekerjasama dalam memberantas terorisme internasional, perubahan kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat juga bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan di Indonesia guna melindungi asset - asset pemerintahan, warganegaranya serta perusahaan - perusahaan multinasional

Amerika Serikat yang beroperasi di Indonesia. Selama ini perusahaan - perusahaan yang beroperasi di Indonesia selalu dicekam ketakutan akan bahaya terorisme, seperti EXXON Mobil yang selalu diancam oleh GAM (Gerakan Aceh Merdeka) serta Freeport yang selalu terancam oleh keberadaan OPM (Organisasi Papua Merdeka)

Kepentingan keamanan dan ekonomi, selama ini sangat dominan dalam mewarnai hubungan politik luar negeri Amerika Serikat dan Indonesia. Kerjasama yang luas di bidang keamanan dan ekonomi juga bertujuan untuk menarik investor dari Indonesia agar berinvestasi di Amerika Serikat yang saat ini sedang dilanda krisis. Krisis ekonomi yang diakibatkan oleh rendahnya kepercayaan investor terhadap perekonomian Amerika Serikat yang sering terjadi skandal. Selain itu dengan dibukanya kembali kerjasama militer dengan Indonesia, merupakan peluang pasar yang besar bagi perusahaan produsen senjata Amerika untuk memasarkan produknya sehingga dapat meraih keuntungan yang besar, hal ini karena selama ini industri militer merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Amerika Serikat.

Dengan adanya kerjasama yang lebih luas antara Amerika Serikat dan Indonesia juga dapat meningkatkan *mutual confidence* dalam memerangi terorisme, serta dapat melepaskan diri dari krisis ekonomi. Dengan adanya kerjasama dengan Amerika Serikat, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan investor kepada Indonesia dalam masalah stabilitas keamanan. Dengan pulihnya kepercayaan investor asing, maka akan semakin mempercepat proses *recovery* ekonomi Indonesia yang terkena krisis berkepanjangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Art, J Robert, *America's Foreign Policy* dalam Roy C. Macridis(ed), *Foreign Policy in World Politics: States and Region* , Englewood Cliffs, New Jersey Prentice Hall, 1998.
- Bayu Perwita, Anak Agung, *Politik Luar Negeri Amerika Serikat Pasca Pemilu 1996: Kontinuitas atau Perubahan*, Analisis CSIS th. XXV/ no. 6, 6 Nov – Des 1997.
- Cipto, Bambang, *Tekanan Amerika Terhadap Indonesia* , Pustaka Pelajar, Jakarta, 2003.
- Coplin. D William, *Pengantar Politik Internasional. Suatu Telaah Teoritis edisi ke II*, CV. Sinar Baru, Bandung, 1992.
- Cormick, M James, *Interest Groups and The Media in Post – Cold War US Foreign Policy*, dalam Scott, M James, *Making United States Of America Policy in the Post – Cold War World*, Durham and London, Duke University Press, 1998.
- Daughherty E. James and Pfaltzgraft. Jr, *Contending Theories of International Relations*, 3 rd Edition, Harper Collins Publishers. Inc, New York, 1990.
- Gie, The Liang, *Ilmu Politik : Suatu Pembahasan tentang Pengertian Kedudukan, Lingkup dan Metodologi*, Gajahmada University Press, Yogyakarta, 1984
- Garver, W John, *The Reagan Administration's Southeast Asian Policy* , dalam Hsiung,C James, *US – Asian Relations : The National Security Paradox*, Preager, New York, 1983.
- Habib, Hasnan, *Kapita Selekta: Strategi dan Hubungan Internasional*, Center for Strategic and International Studies, Jakarta,1997
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid I*, Penerbit Andi, Jakarta,2000
- Holsti, KJ, *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*, Bina Cipta, Jakarta, 1987.
- Holmes, R Kim, *A save and Prosperous America: A US Foreign Policy and Defense Policy Blue Print*, The Heritage Foundation, Washington DC, 2002.
- Hopkins, F Raymond and Mansbach, W Ricard , *Structure and Process in International Politics*, Harper & Row,New York, 1993

- Ikenberry, G. John, *America's Imperial Ambition. Foreign Affair*, Sept – Oct 2002
- Jack, C Plano, Olton Roy, *Kamus Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Juanda, Wawan, Putra A. Bardin*, Jakarta, 1999,
- Kegley W. Charles, *The Neoliberal Challenge to Realist Theories of World Politics An Introduction*, St. Martins Press, New York, 1995.
- Korten, C David, *Bila Korporasi Menguasai Dunia, Profesional Books*, Jakarta, 1997.
- Mas' oed, Mochtar, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta, 1990
- Morgenthau J. Hans and Thomson W. Kenneth, *Politic Among Nations: The Struggle for Power and Peace*, Alfred A. Knopf, New York, 1985
- Notosusanto, Smita Indriya, *Politik Global Amerika Serikat Pasca Perang Dingin , dalam Sudarsono, Juwono et. al, Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan Tantangan Masa Depan*, Pustaka Jaya, Jakarta, 1996.
- Plano, Jack C. Robert Eriggs.Helena S. Robin, *Kamus Analisa Politik*, CV. Rajawali, Jakarta, 1985
- Ruhyanto, Arie, *Abubakar Ba'asyir Melawan Amerika*, Penerbit Galah, Yogyakarta, 2002
- Rosenau, James, *The Scientific Study of Foreign Policy*, The Fances Pinter Ltd, New York, 1980
- Seabury, Paul, *Power, Freedom, and Diplomacy : The Foreign Policy of The United States of Amerika*, Ramdom House, New York, 1963
- Scott, M James, *Making United States Of America Policy in the Post – Cold War World*, Durham and London, Duke University Press, 1998
- Surachmad, Winarno, *Dasar dan Teknik Research : Pengantar Metodologi Ilmiah*, Cv. Transito, Bandung, 1987.
- Sherill, Robert, *Governing America an Introduct: on*, Hardcourt Brace Javanovich Inc, New York, 1997.

Wright Quincy, *A Study of International Relation dalam Teori Hubungan Internasional*, FISIP UGM, Yogyakarta, 1987

Surat Kabar / Majalah

Forum Keadilan, 10 November 2002

Forum Keadilan, 19 September 2003

Kompas, 13 September 2003

Kompas, 19 September 2003

Jawa Pos, 17 Januari 2002

Jawa Pos, 22 Pebruari 2003

Jawa Pos, 21 Maret 2003.

Gatra 19 April 2003.

Zakaria Fareed, *Realism and Domestic Politics, International Security*, International Relations Publication, Vol. 17 No. 1, 1992

Ikenberry, G. John, *America's Imperial Ambition. Foreign Affair Journal*, Sept – Oct 2002

Ambrose, E Stephen, *The Presidency and Foreign Policy*, Foreign Affair Journal, Vol. 70, 1991

Rieff, David, *Whose Internationalism, Whose Isolationism ?*, World Policy Journal, Summer 1996.

Analisis CSIS th XXV/ no.6, Nov – Des. 1997

Encyclopedia of Terrorism, S Chand & Company LTD, 1995
Prima edisi XXXV

The Straits Times, 25 Januari 2002

Situs Internet.

www.defenselink.mil/US_source/78634/3_2002/html.

www.whitehouse.gov/reports_6/78_2002/html.

www.usinfo.com/news/4367_us/02/html.

www.bi.org/us_rt/9783/02_lm/html-1k-
www.opensecrets.org/publ/us_547/us_02/html
www.newsweek.com/us_reports/87945/02/html-10k-
www.ustr.gov/us_links/973765/02/html
www.kompasonline.com/news_us/ter_692/02.html
www.usembassy.state.gov/78357_02/us_publ/eng/2002/html
www.depperindag.go.id/lap_keu/02_6/html
www.dephan.go.id/reports/ind_02/bin65/html
www.cnn.com/us_news/543289743/ter_reports/02/html-101k-

